



**INTERVENSI ARAB SAUDI DALAM KONFLIK DI YAMAN DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP *HUMANITARIAN CRISIS***

*(SAUDI ARABIA'S INTERVENTION IN YEMEN'S CONFLICT AND ITS  
IMPLICATION TO HUMANITARIAN CRISIS)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

**Oleh:**

**Merliani Laraswati**

**NIM 140910101048**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Sunardi dan Sulikah, selaku orang tua yang telah berjuang untuk memberikan kebahagiaan dan pendidikan terbaik, serta senantiasa mendo'akan dan mendukung saya dalam suka maupun duka.
2. Yayuk Endah Ernani, Retno Purwanti, dan Debby Ria Puji Anggraini, kakak tercinta yang selalu mendukung dan mendoa'akan selama masa pendidikan serta memantau perkembangan skripsi saya.
3. Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) yang telah menemani berproses dalam menjalankan organisasi.
4. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember angkatan 2014 yang telah menjadi keluarga kedua selama berada di perantauan.
5. Teman-teman Theodore Alburique yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka dalam proses pengerjaan tugas akhir.
6. Teman-teman Beswan Djarum angkatan 32 yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir.

**MOTTO**

*"A dream doesn't become reality through magic, it takes sweat, hard work,  
and determination,"<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Colin Kodesperan Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang ke 65

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merliani Laraswati

NIM : 140910101048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Intervensi Arab Saudi dalam konflik di Yaman dan implikasinya terhadap *Humanitarian Crisis*” adalah hasil buah fikir saya sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya lampirkan sumbernya, belum pernah diajukan pada lembaga atau institusi manapun, dan bukan karya ilmiah yang menjiplak dari karya orang lain. Saya bertanggung jawab terkait keabsahan dan kebenaran pada isi karya ilmiah ini yang sudah seharusnya dijunjung tinggi

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mendapat sanksi akademik jika apa yang saya nyatakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Jember, 29 Januari 2019

Yang menyatakan

Merliani Laraswati

NIM. 140910101048

**SKRIPSI**

**INTERVENSI ARAB SAUDI DALAM KONFLIK DI YAMAN DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP *HUMANITARIAN CRISIS***

*(SAUDI ARABIA'S INTERVENTION IN YEMEN'S CONFLICT AND ITS  
IMPLICATION TO HUMANITARIAN CRISIS)*

**Oleh:**

**Merliani Laraswati**

**NIM. 140910101048**

**Pembimbing:**

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, SIP. M.A.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Intervensi Arab Saudi dalam Konflik di Yaman dan Implikasinya Terhadap *Humanitarian Crisis*” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin  
tanggal : 11 Maret 2019  
waktu : 09.00  
tempat : Ruang Ujian Bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,  
Ketua

Dra. Sri Yuniati, M.Si.  
NIP 196305261989022001

Sekretaris I

Sekretaris 2

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.  
NIP 195904231987021001

Fuat Albayumi, S.IP., MA.  
NIP 197404242005011002

Anggota I

Anggota 2

Honest Dody Molasy, S.Sos, MA.  
NIP 197611122003121002

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si.  
NIP 196105151988021001

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Intervensi Arab Saudi dalam Konflik di Yaman dan Implikasinya terhadap *Humanitarian Crisis***; Merliani Laraswati; 140910101048; 2019; 97 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perang Saudara antara kelompok Houthi dan unit militer Yaman pada tahun 2014 ditengahi oleh PBB melalui perjanjian perdamaian *The Peace and National Partnership Agreement* yang juga merumuskan tatanan pemerintahan baru. Kelompok Houthi yang tidak setuju dengan tatanan pemerintahan yang baru tersebut, melanggar perjanjian dengan melakukan serangan militer terhadap pemerintahan resmi Yaman. Dalam aksinya, Kelompok Houthi menempatkan Presiden Hadi di bawah tahanan rumah yang berujung pada pengunduran diri dibawah tekanan. Kelompok Houthi yang semakin tidak terkontrol memaksa Presiden Hadi untuk meminta bantuan kepada Arab Saudi yang kemudian direspon dengan rangkaian serangan militer yang justru menyebabkan krisis kemanusiaan di Yaman. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari intervensi Arab Saudi terhadap krisis kemanusiaan di Yaman.

Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu buku cetak, buku elektronik, situs internet dan jurnal ilmiah. Analisis data yang dilakukan yakni menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Permasalahan di deskripsikan kemudian dianalisis menggunakan teori sebagai alat bantu untuk membuat analisis yang kemudian diakhiri kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman menyebabkan terciptanya keadaan darurat kompleks yang kemudian berujung pada terjadinya krisis kemanusiaan yang ditandai dengan kekerasan yang meluas dan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil; pemindahan populasi; meluasnya penderitaan masyarakat, kelaparan, dan wabah penyakit; kebutuhan bantuan kemanusiaan berskala besar dan hambatan arus

bantuan kemanusiaan oleh kendala politik dan militer; serta ancaman keamanan yang signifikan bagi pekerja kemanusiaan.



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu tercurahkan. Atas segala rahmat, petunjuk serta karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Intervensi Arab Saudi dalam konflik di Yaman dan implikasinya terhadap *humanitarian crisis*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama jadi mahasiswa
3. Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Fuat Albayumi, SIP. M.A. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir
4. Fuat Albayumi, SIP. M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama masa perkuliahan serta dalam pengerjaan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun penulis berharap, apa yang disampaikan di dalam skripsi ini sedikit banyak akan bermanfaat.

Jember, 11 Maret 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Ruang Lingkup Pembahasan</b> .....	7
<b>1.2.1. Batasan Materi</b> .....	7
<b>1.2.2. Batasan Waktu</b> .....	8
<b>1.3. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.4. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.5. Landasan Pemikiran</b> .....	9
<b>1.5.1. Konsep Intervensi</b> .....	9
<b>1.5.2. Konsep <i>Humanitarian Crisis</i></b> .....	13
<b>1.6. Argumen Utama</b> .....	16
<b>1.7. Metode Penelitian</b> .....	16
<b>1.7.1. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	16
<b>1.7.2. Teknik Analisis Data</b> .....	17
<b>1.8. Sistematika Penulisan</b> .....	17
<b>BAB 2 GAMBARAN UMUM PERANG SAUDARA DI YAMAN</b> .....	19
<b>2.1. Latar Belakang Munculnya Perang Sudara di Yaman</b> .....	19

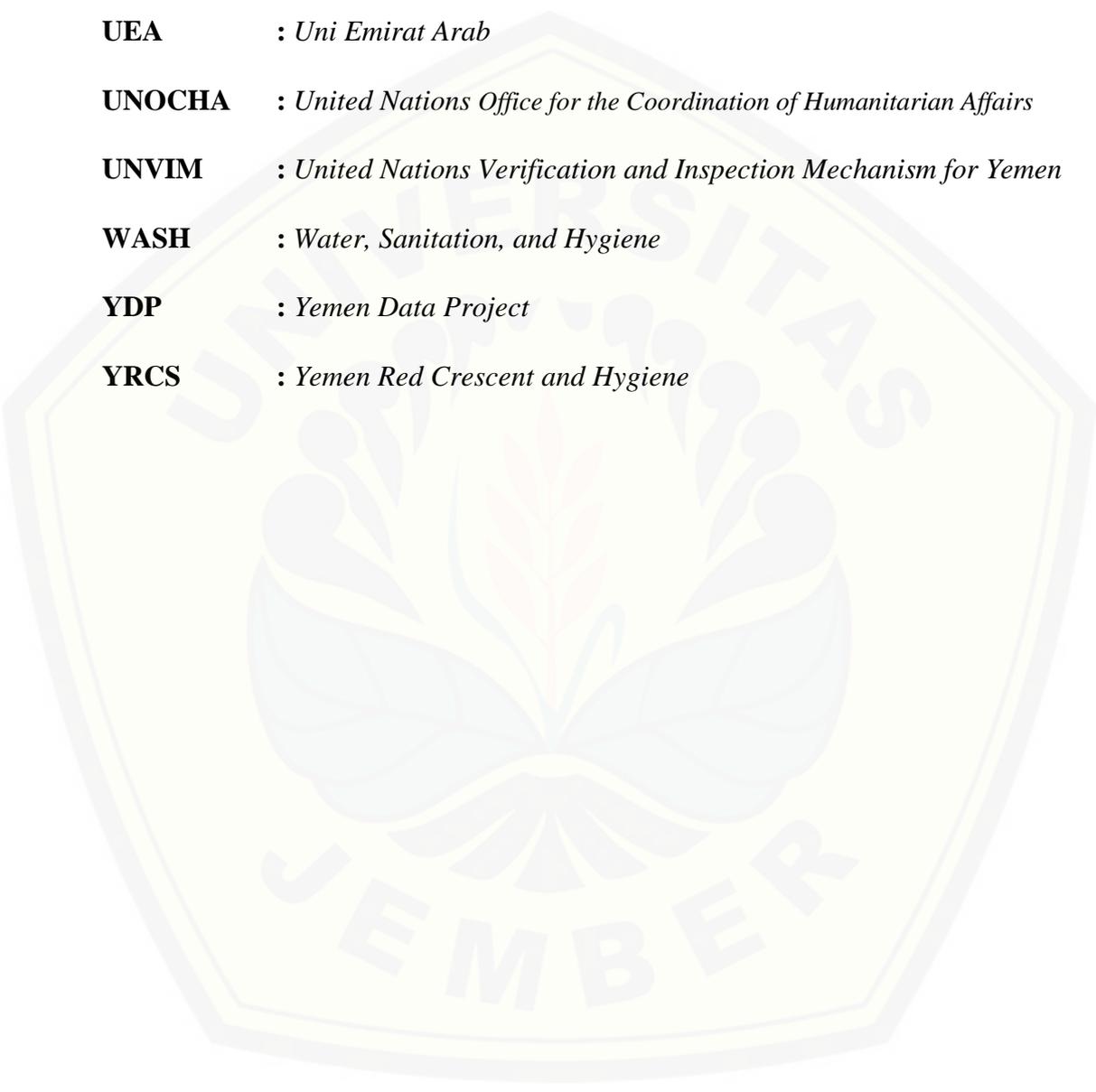
2.1.1. Kondisi Geografi yang Tidak Subur .....	19
2.1.2. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi .....	23
2.1.3. Kesenjangan Pembangunan .....	24
2.2. Perang Saudara di Yaman dan Dinamikanya .....	25
2.3. Dampak Perang Saudara di Yaman .....	31
<b>BAB 3 INTERVENSI ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI YAMAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Intervensi Arab Saudi di Yaman .....	40
3.1.1. Intervensi di Wilayah Darat .....	42
3.1.2. Intervensi di Wilayah Udara .....	45
3.1.3. Intervensi di Wilayah Laut .....	50
3.2. Kepentingan Arab Saudi di Yaman .....	51
<b>BAB 4 IMPLIKASI INTERVENSI ARAB SAUDI TERHADAP <i>HUMANITARIAN CRISIS</i> DI YAMAN .....</b>	<b>55</b>
4.1. Meningkatnya Kekerasan .....	55
4.2. Meningkatnya Perpindahan Penduduk .....	64
4.3. Penurunan Perekonomian Negara .....	69
4.4. Meningkatnya Kebutuhan Bantuan Kemanusiaan dan Hambatan Arus Bantuan Kemanusiaan .....	78
4.5. Meningkatnya Ancaman Keamanan Bagi Pekerja Bantuan Kemanusiaan .....	86
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1. Peta Administrasi Yaman .....	20
Gambar 2.2.1. Piramida Populasi Yaman 2018 .....	24
Gambar 3.1.1. Frekuensi Penargetan Serangan Udara Maret 2015 - Maret 2018 .....	48
Gambar 3.1.2. Frekuensi Pengeboman Insfrastruktur, Lahan Pertanian, Lahan Pertenakan, dan Pasar di Yaman .....	49
Gambar 4.1.1 Jumlah Serangan Militer yang diluncurkan di Yaman antara tahun 2016-2017 .....	58
Gambar 4.1.2. Jumlah Korban Kekerasan Setelah Adanya Intervensi dari Arab Saudi .....	63
Gambar 4.2.1. Jumlah <i>Internally Displaced Persons</i> .....	65
Gambar 4.2.2. Data <i>Internally Displaced Persons</i> Berdasarkan wilayah 2017 .....	66
Gambar 4.2.3. Grafik Peningkatan Jumlah IDPs 2017 .....	67
Gambar 4.3.1. Inflasi Akibat Perang Saudara .....	70
Gambar 4.3.2. Penurunan GDP dan Peningkatan Inflasi di Yaman .....	71
Gambar 4.3.3. Impor Bahan Bakar Yaman Selama Periode Blokade.....	72
Gambar 4.3.4. Persebaran Kasus Kolera di Yaman .....	76
Gambar 4.4.1 Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan	79
Gambar 4.4.2 Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan Berdasarkan Wilayah .....	80
Gambar 4.4.3. Grafik Jumlah Orang yang Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan dari Tahun 2013-2018 .....	81
Gambar 4.4.4. Data Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan Berdasarkan Wilayah .....	82

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>ACLED</b>	: <i>the Armed Conflict Location Event Dataset</i>
<b>AOAV</b>	: <i>Action on Armed Violence</i>
<b>AQAP</b>	: <i>Al-Qaeda in the Arabian Peninsula</i>
<b>CBY</b>	: <i>Central Bank of Yemen</i>
<b>CRED</b>	: <i>Centre for Research on the Epidemiology of Disasters</i>
<b>ERW</b>	: <i>Explosive Remnant of War</i>
<b>GBV</b>	: <i>Gender Based Violence</i>
<b>GCC</b>	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
<b>GPC</b>	: <i>General People's Congress Party</i>
<b>HAM</b>	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
<b>IASC</b>	: <i>International Accounting Standards Committee</i>
<b>ICRC</b>	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
<b>IDPs</b>	: <i>Internally Displaced Persons</i>
<b>IED</b>	: <i>Improvised Explosive Device</i>
<b>IFRC</b>	: <i>International Federation of Red Cross and Red Societies</i>
<b>MoPIC</b>	: <i>Ministry of Planning and International Cooperation</i>
<b>MT</b>	: <i>Metrik Ton</i>
<b>PBB</b>	: <i>Persatuan Bangsa-Bangsa</i>
<b>PNPA</b>	: <i>The Peace and National Partnership Agreement</i>
<b>R2P</b>	: <i>Responsibility to Protect</i>



<b>SPC</b>	: <i>Supreme Political Council</i>
<b>SRP</b>	: <i>Supreme Revolutionary Committee</i>
<b>TDA</b>	: <i>Tihama Development Authority</i>
<b>UEA</b>	: <i>Uni Emirat Arab</i>
<b>UNOCHA</b>	: <i>United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>
<b>UNVIM</b>	: <i>United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen</i>
<b>WASH</b>	: <i>Water, Sanitation, and Hygiene</i>
<b>YDP</b>	: <i>Yemen Data Project</i>
<b>YRCS</b>	: <i>Yemen Red Crescent and Hygiene</i>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Yaman merupakan salah satu pusat Islam tertua dan paling penting di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Yaman berbatasan dengan Arab Saudi di utara, Teluk Eden di selatan, Oman sampai Timur, dan Laut Merah sampai Barat. Yaman memiliki luas 527.970 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 28 juta orang dengan Islam sebagai agama resmi negara (Mohammed dkk, 2017: 2). Dalam sejarahnya, Yaman awalnya terpisah menjadi dua negara yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Kemudian pada tahun 1990, kedua Negara tersebut bersatu dimana penyatuannya dilatarbelakangi oleh banyaknya persamaan yang dimiliki kedua negara tersebut. Persamaan-persamaan yang terdapat dalam negara-negara tersebut antara lain adalah persamaan kebudayaan, bangsa, dan keadaan sosial, dimana dari kesamaan tersebut kemudian dibuat kesepakatan untuk menggabungkan Yaman Utara dan Yaman Selatan menjadi sebuah negara dengan satu pemerintahan. Penyatuan ini terjadi melalui proses yang panjang dan rumit. Meskipun demikian, penyatuan ini dapat terwujud dan menjadikan Yaman sebagai negara yang berbentuk Republik di Jazirah Arab, dan Ali Abdullah Saleh diangkat menjadi Presiden Yaman.

Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan ini diharapkan dapat menjadikan Yaman sebagai negara yang lebih kuat dan sejahtera. Namun, Pergolakan politik mulai muncul di Timur Tengah akibat gelombang protes yang kemudian disebut *Arab Spring* (Juneau, 2013: 408). *Arab Spring* sendiri muncul akibat maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, tingginya angka pengangguran, rezim diktator, kemiskinan, naiknya harga kebutuhan pokok, terlantarnya nasib buruh, dan monopoli kekayaan serta korupsi oleh para pejabat yang kemudian menyebabkan berjangkitnya “virus” revolusi di negara-negara Timur Tengah.

Di Yaman, gelombang protes bermula pada pertengahan Januari 2011 baik di bagian utara maupun selatan. Para demonstran pada mulanya menginginkan pemerintah Yaman untuk memodifikasi konstitusi, menangani kasus korupsi, dan kondisi ekonomi serta masalah pengangguran (Juneau, 2013: 409). Namun, permintaan tersebut kemudian berujung pada tuntutan kepada Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari jabatannya. Sebelum konflik memanas, Yaman sendiri adalah negara berpenghasilan rendah yang menghadapi tantangan jangka panjang yang rumit yaitu untuk menstabilkan dan menumbuhkan perekonominya, dimana perang saudara yang terjadi memperburuk isu-isu tersebut. Yaman menghadapi masalah perekonomian yang sangat pelik, hal ini karena Yaman merupakan negara yang sangat miskin diantara negara-negara Arab lainnya. Konflik yang sedang berlangsung telah menghentikan ekspor Yaman, menekan nilai tukar mata uang, mempercepat inflasi, dan impor makanan, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas. Situasi di Yaman dianggap sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ UNOCHA*), dari total populasi hampir 30 juta orang, 22,2 juta orang Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, 17,8 juta orang diantaranya dalam kondisi rawan pangan dan 8,4 juta orang sangat rawan pangan dan beresiko mengalami kelaparan (Sharp, 2018: 19).

Pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah berlangsung puluhan tahun ini mulai retak pada tahun 2011, ketika kerusuhan politik meletus di seluruh dunia Arab. Prihatin dengan kerusuhan politik dan keamanan yang memperkuat elemen teroris, membuat Amerika Serikat, Arab Saudi, dan anggota masyarakat internasional lainnya berusaha untuk menjadi perantara dalam kompromi politik, yang kemudian berujung pada sebuah transisi dimana pada tahun 2012 Wakil Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi diangkat menjadi presiden Yaman dan dengan dukungan Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Hadi berusaha untuk mereformasi sistem politik Yaman (Sharp, 2018: 1).

Sepanjang tahun 2013, Pemerintah Yaman mengadakan Konferensi Dialog Nasional yang bertujuan untuk mencapai konsensus nasional mengenai tatanan politik baru. Namun, pada Januari 2014 konferensi tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Salah satu kelompok anti-pemerintah yaitu Al-Houthi di Yaman Utara, berusaha menggunakan kekuatan militer untuk membentuk kembali tatanan politik. Dalam beberapa minggu setelah Konferensi Nasional berakhir, Al-Houthi meluncurkan serangan militer terhadap sekutu Presiden Hadi. Al-Houthi bergabung dengan pasukan yang masih setia kepada mantan Presiden Saleh, menciptakan aliansi yang merupakan lawan yang tangguh bagi Presiden Hadi dan sekutunya. Pada tahun 2014, kelompok Houthi mengambil alih ibukota dan melanggar beberapa peraturan pembagian kekuasaan (Sharp, 2017: 1).

Kelompok Houthi sendiri adalah penduduk Yaman yang tinggal di wilayah Yaman Utara, tepatnya di provinsi Sa'ada. Wilayah ini merupakan wilayah yang miskin dan tertinggal, sangat berbeda dengan wilayah Yaman Selatan yaitu Sana'a yang lebih tertata. Kelompok ini dibentuk oleh Husein Baddaruddin Al Houthi yang dulunya merupakan pendukung pemerintah bahkan sempat menjadi anggota parlemen di pemerintahan Yaman. Karir politiknya dimulai sebagai salah seorang pendiri partai Al-Haq yang berideologi Islam. Ketika tahun 1991 partai sosialis berkuasa di Yaman, partai Al Haq yang ideologinya berdasarkan Islam dibentuk untuk mencegah meluasnya pemikiran ekstrim Partai Asosiasi Reformasi Yaman dan Husein Al Houthi termasuk salah satu pendiri dari partai tersebut. Pada tahun 1993 Husein Al Houthi ikut serta dalam pemilu legislatif dan akhirnya terpilih menjadi anggota parlemen. Ketika banyak warga Yaman yang beraliran Wahabi dari Afganistan kembali ke Yaman pada tahun 1996, mulai terjadi perpecahan dan pertentangan di dalam tubuh pemerintah Yaman. Dengan maksud untuk mencegah meluasnya pemikiran ekstrim dan keras tersebut, pemerintah Yaman meminta bantuan kepada Husein Al Houthi (Sharp, 2017: 1).

Namun, pada tahun 1997 Husein Al Houthi keluar dari partai Al Haq dan membentuk Gerakan Al Syahab Al Mukmin (Gerakan Pemuda Mukmin). Saat itu pemerintah masih memberikan bantuan kepada gerakan yang didirikan oleh Husein Al Houthi ini dan memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas

melawan para pemikir Wahabi. Akan tetapi semua berubah pada tahun 2003 dimana sekitar 650 anggota Gerakan Al Syabab Al Mukmin ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara akibat menyerukan slogan yang menghina dan menjelekkan Amerika Serikat dan Israel. Husein Al Houthi dan para pengikutnya berusaha keras untuk membebaskan anggota-anggotanya, namun tidak berhasil. Dimulai dari peristiwa itulah hubungan antara Gerakan Al Syabab Al Mukmin dengan pemerintah Yaman menjadi tidak harmonis.

Pemerintah Yaman sendiri awalnya menekan gerakan ini melalui jalur politik, akan tetapi lama kelamaan tekanan tersebut ditingkatkan intensitasnya menggunakan kekuatan militer. Dalam aksinya melawan pemerintah, Al Houthi bergabung dengan berbagai macam kelompok separatis. Bersatunya Al Houthi dengan kelompok separatis lainnya ini bukan hanya karena persamaan ideologi, akan tetapi faktor kemiskinan di daerah Yaman Utara akibat ketidakadilan Pemerintah Pusat. Pemerintah Yaman dianggap melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah Yaman Utara yang mayoritas menganut paham Syi'ah. Hal ini dikarenakan masyarakat Yaman Utara tidak merasakan pembangunan ekonomi di wilayahnya, selain itu adanya marginalisasi politik, ekonomi, dan agama oleh pemerintah Yaman juga menjadi faktor pendorong adanya pemberontakan ini.

Setelah menduduki ibu kota Yaman, pada tahun 2015 kelompok Houthi menempatkan Presiden Hadi sebagai tahanan rumah. Meskipun Presiden Hadi berhasil melarikan diri ke Aden di Yaman selatan, posisinya menjadi tidak dapat dipertahankan karena pasukan Houthi maju dari ibu kota sampai ke Aden. Karena situasi yang mendesak, pada bulan Januari 2015 Presiden Mansour Hadi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Yaman, dimana mundurnya Presiden Hadi ini membuat kekuasaan di Yaman kosong. Selain itu, Pemerintahan bentukan Kelompok Houthi pun tidak mendapatkan dukungan dari warga Yaman yang menyebabkan situasi di Sana'a semakin memburuk, dan memaksa Presiden Hadi untuk melarikan diri dari Sana'a dengan bantuan Dewan Keamanan PBB. Namun kemudian, pada bulan Februari 2015 Presiden Hadi menarik pengunduran dirinya dan mengumumkan Aden sebagai ibu kota

sementara Yaman. Selain itu, Presiden Hadi juga meminta bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara teluk untuk memulihkan kekuasaannya di sana. Presiden Hadi melayangkan surat dan menceritakan keadaan Yaman yang telah berada di ambang kehancuran. Setelah menerima surat permintaan bantuan tersebut, Arab Saudi membentuk sebuah koalisi pada bulan Maret 2015, dan meluncurkan sebuah operasi militer yang bertujuan memulihkan kekuasaan Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi. Koalisi tersebut meliputi Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, dan Sudan. Negara-negara yang tergabung dalam koalisi ini turut meluncurkan pesawat-pesawatnya dalam operasi militer tersebut. Selain itu, kendaraan lapis baja, tank, dan kendaraan pengangkut personel juga dikerahkan untuk melancarkan operasi ini. Koalisi yang dipimpin Saudi juga bergantung pada pasukan Yaman setempat untuk melakukan operasi darat, dimana ratusan tentara Yaman telah dilatih di Arab Saudi. Unit sekutu ini terdiri dari gabungan unit tentara Yaman, pasukan kesukuan, milisi Islam, dan separatis selatan yang menentang peraturan Houthi (Sharp, 2017: 20).

Saat pasukan Houthi maju ke kota Aden, koalisi pimpinan Arab Saudi meluncurkan serangan udara sebagai tanggapan atas permintaan spesifik dari Presiden Hadi yang meminta dukungan dengan segala cara yang diperlukan, termasuk intervensi militer untuk melindungi Yaman dan rakyatnya dari Houthi yang terus-menerus melakukan serangan dan mencegah serangan yang dikhawatirkan terjadi setiap saat di kota Aden dan wilayah selatan lainnya. Semakin kuatnya pengaruh kelompok Al-Houthi melawan Pemerintah Yaman mengantarkan konflik tersebut kepada konflik internasional akibat perselisihan internal. Intervensi asing akan terjadi ketika perselisihan domestik mengancam kepentingan negara lain baik bersifat ideologis maupun geopolitis. Dapat dilihat bahwa Yaman dan Arab Saudi sama-sama memiliki masyarakat dengan ideologi Sunni dan Syiah, dengan persamaan ideologis tersebut pemerintah Yaman mencari dukungan kepada Saudi dalam melawan Syiah di Yaman.

Berawal dari perselisihan domestik yang berujung pada konflik internasional, konflik di Yaman yang multidimensi dapat dilihat dari letak provinsi Sa'adah yang merupakan daerah strategis dari sisi geopolitik dan

geomiliter, dimana salah satu provinsi yang menghadap ke Laut Merah berhadapan dengan selat Aden dan Bab ul Mandep dari sisi Utara-Selatan, yang merupakan tempat kelompok Al-Houthi berada. Daerah pegunungan di utara Yaman yang berbatasan dengan Saudi, merupakan daerah yang cukup strategis dari sudut pandang militer. Karena daerah pegunungan ini merupakan benteng kekuatan militer dan dengan sendirinya akan memiliki kemampuan untuk mengontrol semua daerah dibawahnya. Dengan pertimbangan ini, maka Sa'adah dianggap sebagai daerah yang strategis dan penting di daerah sekitar Laut Merah dan daerah perbatasan Yaman-Saudi, atau dapat dikatakan bahwa posisi Sa'adah merupakan posisi kunci bagi daerah Selatan Saudi Arabia dan juga laut Merah yang menghubungkan laut itu dengan lautan lepas teluk Aden dan Laut Arabia melalui Bab ul Mandeb.

Intervensi Saudi di Yaman bukan sekedar bertujuan untuk menumpas kelompok Al-Houthi, dapat dilihat bahwasanya Saudi berupaya melumpuhkan kekuatan komunitas muslim Syiah di Utara Yaman, agar komunitas syiah di Arab Saudi tidak terpengaruh dengan konflik yang terjadi di Yaman. Seperti diketahui Saudi memiliki masyarakat minoritas Syiah. Populasi Syiah di Saudi sekitar 15% dari jumlah penduduk Saudi. Meskipun hanya menjadi golongan minoritas, kaum Syiah sangat berpengaruh bagi pemerintah Saudi. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara kaum Syiah Saudi dan pemerintah Revolusioner Republik Islam Iran yang merupakan satu-satunya yang bermazhab Syiah di dunia. Selain itu, kaum Syiah juga menempati lokasi disepanjang pantai Teluk Parsi dan kawasan minyak yang penting bagi negara.

Intervensi ini dimaksudkan untuk mengupayakan perdamaian dalam konflik yang terjadi di Yaman. Arab Saudi melancarkan serangan militer besar-besaran di Yaman dengan mengerahkan 100 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini. Tidak sampai pada penyerangan saja, Arab Saudi juga menarget pusat-pusat bantuan kemanusiaan bagi warga Yaman. Salah satunya adalah bombardir pelabuhan Hodeidah yang terletak di bagian Barat Yaman yang merupakan wilayah vital dalam penyaluran bantuan kemanusiaan internasional kepada warga Yaman. Selain itu, Arab Saudi dan sekutu-sekutu Arabnya telah

menempatkan pasukan angkatan laut di sekitar perairan Yaman sejak tahun 2015. Dimana penempatan kekuatan militer ini dilakukan sebagai cara untuk menghentikan penyelundupan senjata kepada pejuang Houthi yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Namun, koalisi pasukan angkatan laut pimpinan Arab Saudi ini juga mencegah pasokan penting termasuk pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar untuk memasuki Yaman, bahkan dalam kasus di mana kapal tidak membawa senjata. Arab Saudi yang didukung oleh UEA dan beberapa negara teluk lainnya melancarkan serangan militer ke Yaman sejak Maret 2015, dan kemudian memblokir negara ini dari darat, laut dan udara yang menimbulkan banyak korban berjatuh dan menimbulkan krisis kemanusiaan terjadi di Yaman menjadi lebih buruk. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai implikasi dari intervensi Arab Saudi terhadap krisis kemanusiaan yaitu sebuah situasi dimana tingkat penderitaan manusia yang tinggi dan kesejahteraan dasar manusia berada dalam bahaya dalam skala besar di Yaman. Krisis kemanusiaan terjadi ketika suatu masyarakat tidak dapat mengatasi tekanan-tekanan yang diterima.

## **1. 2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam sebuah penelitian ilmiah dianggap perlu untuk membantu penulis agar tetap fokus pada pembahasan penelitian. Disamping itu, ruang lingkup pembahasan juga dapat membantu penulis untuk memperkuat dan mempertegas apa yang ingin disampaikan melalui penelitian yang dilakukannya. Selain itu, adanya ruang lingkup pembahasan juga dapat membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian.

### **1.2.1. Batasan Materi**

Batasan materi digunakan penulis untuk memberikan batasan pada materi yang dijadikan permasalahan dalam sebuah karya ilmiah. Selain itu, batasan materi dapat mempermudah penulis untuk memberikan fokus bahasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Sehingga, pembahasan atas sebuah permasalahan tersebut tidak meluas dan keluar dari bahasan utama. Pada karya ilmiah ini, penulis memberi batasan materi pada kondisi Yaman pasca intervensi

Arab Saudi dalam konflik yang terjadi dan implikasinya terhadap krisis kemanusiaan di Yaman.

### **1.2.2. Batasan Waktu**

Batasan waktu digunakan penulis untuk memberikan batasan pada periode waktu dari suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Batasan waktu ini bertujuan untuk memperjelas rentang waktu dari fenomena yang diteliti, sehingga dapat membantu penulis untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari 26 Maret 2015 yaitu ketika Arab Saudi menyanggupi permintaan Presiden Hadi untuk membantu mempertahankan kekuasaannya dan memulai serangan udara ke Yaman. Kemudian batas akhir penelitian ini adalah sampai bulan Desember tahun 2017 yang merupakan waktu dihentikannya blokade Arab Saudi.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah merupakan pertanyaan singkat dari suatu masalah yang akan diteliti. Rumusan Masalah ini dapat membantu penulis untuk mempermudah proses analisa terhadap objek penelitian, sehingga penting untuk dituliskan dalam sebuah karya ilmiah. Munculnya suatu masalah dalam suatu fenomena yang diteliti merupakan kunci dari sebuah penelitian agar diperoleh pemecahan atas masalah yang peneliti uraikan. Dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menetapkan sebuah rumusan masalah yaitu, **Bagaimana Implikasi Intervensi Arab Saudi dalam Perang Saudara Terhadap Humanitarian Crisis Di Yaman?**

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan kondisi Konflik di Yaman setelah adanya intervensi dari Arab Saudi dan implikasi dari intervensi Arab Saudi terhadap krisis kemanusiaan di Yaman.

## 1.5. Landasan Pemikiran

### 1.5.1. Konsep Intervensi

Berkembangnya studi hubungan internasional telah membuat perubahan besar pada interaksi yang terjadi antar aktor, baik aktor negara maupun bukan negara. Dalam mencapai kepentingannya, aktor-aktor ini berusaha menyatukan tujuan yang ditandai dengan tercapainya suatu kesepakatan atas berbagai kepentingan dan senantiasa menghindari terjadinya konflik baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Namun, perbedaan pandangan antara masing-masing pihak serta sikap yang bertolak belakang mengakibatkan tidak tercapainya suatu kesepakatan yang kemudian berubah menjadi pertentangan dan berakhir menjadi sebuah konflik.

Salah satu cara yang dapat dilakukan agar suatu negara memenuhi kehendak negara lain adalah dengan mengadakan campur tangan dalam urusan internal suatu negara, misalnya keberadaan suatu negara terancam dengan adanya masalah yang timbul di dalam Negara tersebut, namun penyelesaian masalahnya dianggap tidak dapat diterima, sehingga intervensi dilakukan. Kecenderungan untuk melakukan intervensi sebagai instrumen politik luar negeri terus meningkat dan latar belakangnya juga menjadi semakin kompleks. Berikut adalah pengertian intervensi menurut kamus hukum internasional dan beberapa pakar.

Intervensi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai, “*one nation's interference by force, or threat of force, in another nation's internal affairs or in questions arising between other nations*” (*Black's Law Dictionary*, 2009: 826).

Wirjono Prodjodikoro mengutarakan, “Dalam hukum internasional intervensi tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan Negara asing dalam urusan satu negara melainkan berarti sempit, yaitu suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan apabila keinginannya tidak terpenuhi” (Prodjodikoro, 1967: 149).

Oppenheim Lauterpacht mengatakan, “Intervensi merupakan campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara

lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut” (Adolf, 2002: 31).

Pengertian di atas dalam praktek serta penerapannya terkadang bersinggungan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional yaitu prinsip kedaulatan negara dan prinsip non intervensi. Namun, Intervensi ini disahkan oleh hukum internasional dalam kondisi tertentu (Starke, 2006: 137). Berikut adalah beberapa keadaan tertentu dimana tindakan intervensi dibenarkan menurut hukum internasional:

1. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam piagam PBB
2. Intervensi dengan tujuan perlindungan hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain.
3. Pembelaan diri.
4. Intervensi atas negara yang berhubungan dengan protektorat
5. Jika negara dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional (Starke, 2006: 137).

Dalam konteks intervensi militer koalisi Saudi Arabia di Yaman, pembelaan diri (*self defence*) diberlakukan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 51 piagam PBB yang berbunyi:

*“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”*

Secara tekstual Pasal 51 memberikan hak pada negara secara individual atau kolektif untuk melakukan pembelaan diri sendiri (*self-defense*) jika terjadi serangan militer (*if an armed attack accurs*) terhadap anggota PBB. Dimana dalam konteks Intervensi Arab Saudi di Yaman, hal tersebut dapat dilihat dari surat yang ditulis oleh Presiden Yaman yang mengidentifikasi terjadinya suatu serangan bersenjata di negara tersebut.

Intervensi dengan militer dikemukakan oleh Michael Walzer dalam *Just and Unjust Wars*, yakni dengan menempatkan empat situasi yang secara moral tindakan intervensi melalui perang dapat dibenarkan, yakni:

1. *Preemptive intervention*, yakni intervensi dapat dilakukan oleh suatu negara akibat terjadinya situasi perang yang “mendadak” (imminent). Intervensi tidak boleh dilakukan dalam situasi preventive war, yakni suatu keadaan dimana telah diyakini bahwa perang merupakan tindakan terbaik untuk segera dilakukan daripada menundanya. Alasan mengapa intervensi tidak boleh dilakukan dalam preventive war adalah karena di dalam preventive war tidak terdapat situasi bahaya yang jelas (*no clear and present danger*).
2. Intervensi dibutuhkan guna menyeimbangkan intervensi sebelumnya. Intervensi ini dimaksudkan guna menjaga masyarakat lokal dimana sebelumnya telah mengalami intervensi. Dengan kata lain, intervensi ini merupakan intervensi balasan.
3. Intervensi diperlakukan guna membantu individu-individu yang terancam dengan pembunuhan massal. Suatu negara atau masyarakat internasional tidak berarti perlu untuk terlibat langsung dan turut campur menangani isu pembunuhan massal atau genosida, tetapi hanya apabila dirasa perlu saja.
4. Intervensi dapat dilakukan guna membantu di dalam mendapatkan hak melakukan gerakan memisahkan diri (*secessionis movement*). Bantuan terhadap gerakan memisahkan diri dilakukan atas dasar guna memberikan hak serta membangun otonomi mereka sebagai suatu bangsa. Tidak berarti dukungan dan bantuan dapat diberikan bagi semua kelompok atau gerakan yang ingin memisahkan diri, sebab untuk membentuk suatu bangsa yang sah, masyarakat harus dapat memberikan pengorbanan dan perlawanan bagi kebebasan mereka sendiri.

Intervensi militer dalam keadaan tertentu yang bukan merupakan pelanggaran kemerdekaan atau integritas wilayah, dibenarkan menurut hukum internasional dengan pengecualian sebagai berikut :

1. Suatu Negara pelindung (*protector*) telah diberikan hak-hak intervensi (*intervention rights*) yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh Negara yang meminta perlindungan.
2. Jika suatu Negara berdasarkan suatu perjanjian dilarang untuk mengintervensi namun ternyata melanggar larangan ini, maka Negara lainnya yang juga adalah pihak/peserta dalam perjanjian tersebut berhak untuk melakukan intervensi.
3. Jika suatu Negara melanggar dengan serius ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan yang telah diterima umum, Negara lainnya mempunyai hak untuk mengintervensi Negara tersebut. Jadi, jika pemberontak terus-menerus melanggar hak-hak suatu Negara netral selama terjadinya konflik, maka Negara netral tersebut memiliki hak untuk mengintervensi terhadap Negara pemberontak tersebut.
4. Jika warga negaranya diperlakukan semena-mena di luar negeri maka Negara tersebut memiliki hak untuk mengintervensi atas nama warganya tersebut, setelah semua cara damai diambil untuk menangani masalah tersebut.
5. Suatu intervensi dapat pula dianggap sah dalam hal tindakan bersama oleh suatu organisasi internasional yang dilakukan atas kesepakatan bersama Negara-negara anggotanya.
6. Suatu intervensi dapat juga sah manakala tindakan tersebut dilakukan atas permintaan yang sungguh-sungguh dan tegas-tegas (*genuine and explicit*) dari pemerintah yang sah dari suatu Negara (*invitational intervention*). Intervensi ini cukup banyak dilakukan oleh Negara-negara besar dewasa ini.

Dalam konteks intervensi Arab Saudi di Yaman, Presiden Hadi yang merupakan Presiden dari pemerintahan resmi Yaman mengirimkan permintaan bantuan kepada Arab Saudi dan negara-negara teluk untuk memulihkan kekuasaannya. Meskipun dalam keadaan tertentu intervensi ini diperbolehkan untuk dilakukan, namun akibat yang ditimbulkan dari intervensi sangat besar. Karena pada dasarnya menurut Elbadawi dan Sambanis (2000: 12) intervensi lebih mungkin

dilakukan dalam perang yang berdarah. Sousa (2014: 9) mengungkapkan dalam tesisnya yang berjudul *Effect of external interventions on conflict intensity* bahwa intervensi militer dan ekonomi meningkatkan intensitas konflik sehingga, konflik berdarah yang telah terjadi akan diperparah dengan adanya intervensi asing di dalamnya yang artinya akan menambah korban dan penderitaan.

### 1.5.2. Konsep *Humanitarian Crisis*

Krisis kemanusiaan adalah situasi dimana tingkat penderitaan manusia yang tinggi dan kesejahteraan dasar manusia berada dalam bahaya dalam skala besar (Quintanilla dkk, 2014: 33). Istilah krisis kemanusiaan digunakan bila mengacu pada dampak bencana alam, dan buatan manusia dimana bahaya yang ditimbulkannya terjadi pada masyarakat. Ada banyak kemungkinan penyebab krisis kemanusiaan, dimana dua kategori yang paling umum digunakan dalam sektor kemanusiaan untuk menggambarkan jenis krisis adalah (a) bencana alam (*disaster*) dan (b) keadaan darurat yang kompleks (*complex emergencies*) misalnya keadaan darurat yang dihasilkan oleh konflik (Quintanilla dkk, 2014: 33).

#### a. Bencana alam

Secara umum, bencana alam diartikan sebagai peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, atau badai yang sesuai dengan pemahaman umum tentang bencana alam. Quintanilla dkk (2014) menambahkan bahwa bencana alam merupakan peristiwa yang berdampak pada masyarakat. Peristiwa alam yang dramatis dan mempengaruhi manusia, tapi bisa mereka atasi sendiri juga bukan bencana. Misalnya, banjir yang melewati sebuah kota, namun menyebabkan kerusakan yang bisa diperbaiki masyarakat sendiri bukanlah bencana. Bencana alam adalah bencana yang terlalu besar untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

IFRC (*International Federation of Red Cross and Red Societies*) memiliki definisi sendiri tentang bencana, dimana secara lebih spesifik bencana didefinisikan sebagai kejadian tiba-tiba yang secara serius mengganggu fungsi masyarakat dan menyebabkan kerugian moral, material, dan ekonomi atau

lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat untuk menggunakan sumber daya sendiri dalam penanganannya (ICN, 2009: 3).

Peristiwa alam yang dramatis seperti gempa bumi atau angin topan adalah bahaya yang dapat terjadi hampir kapan saja. Menurut IFRC, ada berbagai jenis bahaya beberapa diantaranya adalah bahaya alam yang terjadi secara alami dari fenomena fisik yang disebabkan oleh kejadian cepat atau lambat yang dapat bersifat geofisika (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan aktivitas gunung berapi), hidrologi (longsoran salju dan banjir), bahaya klimatologis (suhu ekstrim, kekeringan, dan kebakaran hutan), bahaya meteorologi (badai dan gelombang badai/lonjakan), atau bahaya biologis (epidemi penyakit dan serangga /hewan). Meskipun sering disebabkan oleh alam, bencana juga bisa berawal dari manusia. Bahaya teknologi atau buatan manusia adalah peristiwa yang disebabkan oleh manusia dan terjadi di atau dekat dengan permukiman manusia. Bahaya ini termasuk kompleksitas keadaan darurat/konflik, kelaparan, populasi pengungsi, kecelakaan industri, dan kecelakaan transportasi. Meskipun tidak termasuk dalam daftar IFRC, kenaikan harga secara mendadak pada barang-barang penting, seperti kenaikan harga pangan global di tahun 2008 juga dapat ditambahkan di sini, dimana bahaya ini disebabkan oleh faktor keuangan (Quintanilla dkk, 2014: 21).

Berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, urbanisasi yang tidak direncanakan, keterbelakangan, dan ancaman pandemik yang merupakan faktor-faktor yang dapat memberatkan bencana ini akan menghasilkan peningkatan frekuensi, kompleksitas dan tingkat keparahan bencana. Individu atau komunitas yang tidak dapat menyelamatkan diri dari bahaya karena mereka terjebak dalam area yang berbahaya, atau karena mereka terlalu miskin untuk mengambil tindakan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri merupakan orang-orang yang rentan. Sehingga menurut IFRC, suatu peristiwa itu dianggap sebagai bencana apabila dampak bahaya terjadi pada orang-orang yang rentan. Kombinasi antara bahaya, kerentanan, dan ketidakmampuan untuk mengurangi konsekuensi negatif akibat bencana. Ini adalah definisi yang penting karena hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya alam yang menciptakan bencana. Kekuatan sebuah komunitas atau masyarakat adalah separuh dari bahaya ini. Sebuah

komunitas dengan sumber daya yang bagus, bangunan yang kuat untuk menahan gempa bumi, sistem peringatan untuk menyuarakan alarm untuk angin topan, dan tidak rentan, maka akan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami “bencana” (Quintanilla dkk, 2014: 22).

b. Keadaan darurat yang kompleks

Keadaan darurat yang kompleks mungkin termasuk bencana alam. Yang membedakan adalah mereka juga melibatkan konflik manusia yang membuat krisis kemanusiaan menjadi jauh lebih buruk dan seperti namanya, lebih rumit. IASC (*International Accounting Standards Committee*) mendefinisikan keadaan darurat yang kompleks sebagai sebuah krisis kemanusiaan di suatu negara, wilayah, atau masyarakat dimana terdapat cukup banyak kewenangan atau bahkan total yang dihasilkan dari konflik internal atau eksternal dan yang memerlukan sebuah respon internasional yang melampaui mandat atau kapasitas dari satu lembaga dan/atau program negara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang berlangsung (Quintanilla dkk, 2014: 23).

IFRC juga telah mengembangkan definisinya sendiri yang didasarkan pada konsep IASC yang menyatakan bahwa beberapa bencana dapat diakibatkan oleh beberapa bahaya yang berbeda yang membuatnya menjadi lebih kompleks yang kemudian disimpulkan bahwa keadaan darurat yang kompleks merupakan krisis kemanusiaan yang terkait dengan konflik kekerasan skala besar seperti perang saudara, pembersihan etnis, dan genosida dimana konflik ini menimbulkan keadaan darurat. (Quintanilla dkk, 2014: 32) Keadaan darurat yang kompleks biasanya ditandai dengan peristiwa sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang meluas
- b. Perpindahan penduduk
- c. Dampak konflik terhadap perekonomian
- d. Kebutuhan akan bantuan kemanusiaan dan hambatan atas bantuan kemanusiaan
- e. Ancaman keamanan bagi pekerja bantuan kemanusiaan (Quintanilla dkk, 2014: 23).

Yaman yang merupakan negara miskin dan sepenuhnya bergantung pada impor makanan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Perang saudara yang terjadi di Yaman telah memperburuk keadaan, dimana perang saudara tersebut menyebabkan penurunan dalam sektor perekonomian negara yang menimbulkan percepatan laju inflasi, menekan impor makanan dan bahan bakar, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas. Ditambah dengan intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan serangan-serangan yang diluncurkan telah menyebabkan munculnya keadaan darurat yang kompleks dimana krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman menjadi lebih buruk. Intervensi dari Arab Saudi dalam perang saudara yang berlangsung telah mendatangkan banyak penderitaan sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung akibat pertempuran dimana penderitaan yang terus-menerus berlangsung merupakan penyebab utama terjadinya krisis kemanusiaan.

## **1.6. Argumen Utama**

Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa intervensi Arab Saudi dalam perang saudara di Yaman berimplikasi terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman. Intervensi Arab Saudi meningkatkan intensitas konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman yang ditandai dengan meningkatnya segala aspek krisis kemanusiaan yang meliputi kekerasan yang meluas, perpindahan penduduk, dampak konflik terhadap perekonomian, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan, terdapat hambatan atau terjadi pencegahan atas bantuan kemanusiaan, serta risiko keamanan bagi pekerja bantuan kemanusiaan.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari analisis hasil penelitian pihak lain dalam bentuk buku, jurnal, berita, sehingga penulis tidak terlibat secara langsung dengan objek kajian, dimana metode ini disebut sebagai studi pustaka. Studi pustaka

dilaksanakan penulis di tempat yang menyediakan data yang relevan untuk penelitian yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Jember dan Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

### **1.7.2 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk menganalisis data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis data yang dilakukan tidak melibatkan angka atau statistik dan penulis dituntut untuk menginterpretasikan dan menjelaskan serta menyimpulkan sebuah fenomena.

## **1. 8. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, antara lain:

### **BAB 1. Pendahuluan**

Bab ini akan menjabarkan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB 2. Gambaran Umum Konflik di Yaman**

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum konflik yang terjadi di Yaman. Penulis akan menjelaskan tentang awal mula terjadinya konflik yang kemudian mengakibatkan munculnya pemberontakan di Yaman yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah dan kemudian berujung pada perang saudara.

### **BAB 3. Intervensi Arab Saudi dalam Konflik yang Terjadi di Yaman**

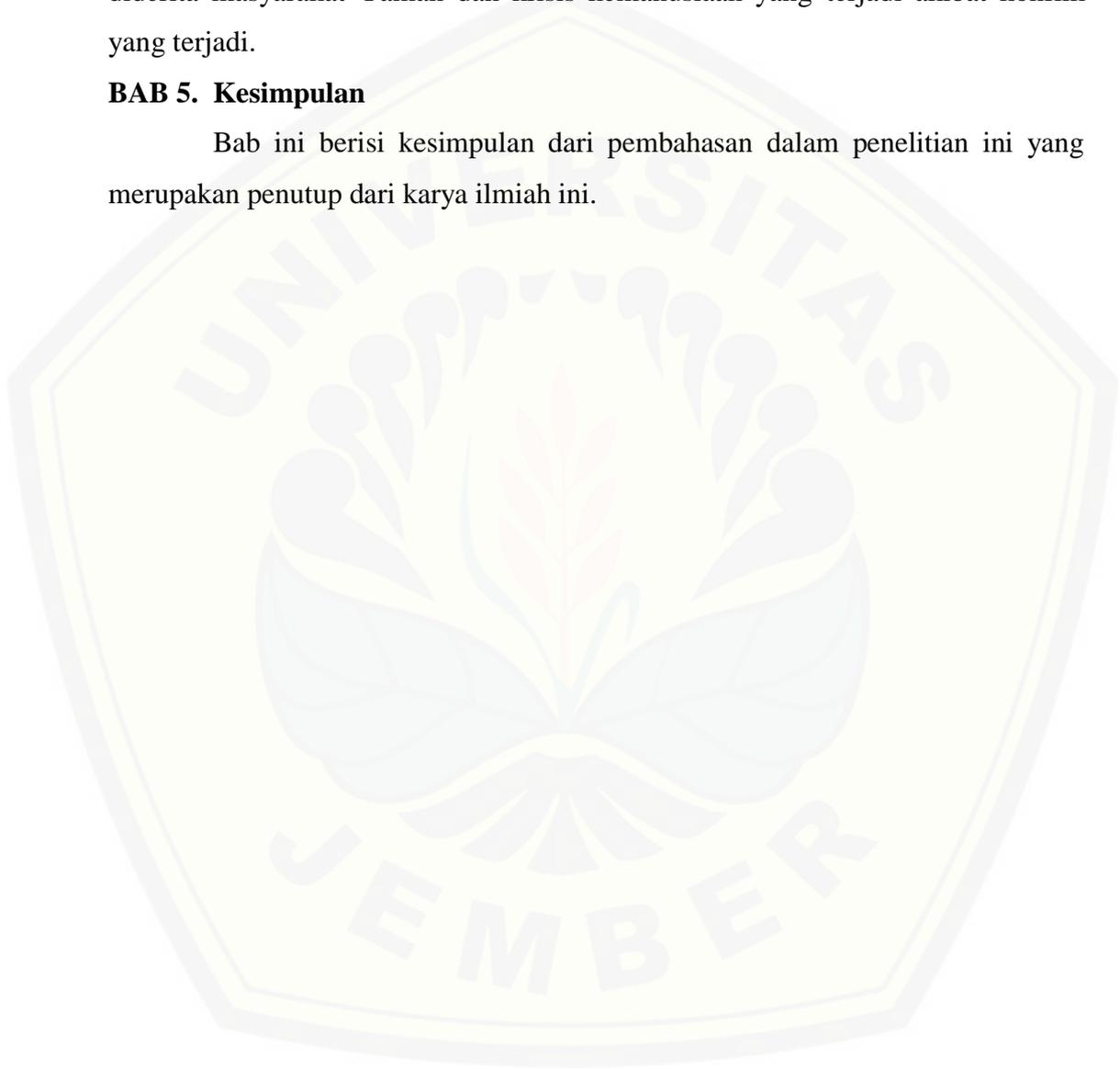
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana keterlibatan Arab Saudi dalam konflik di Yaman termasuk intervensi militer yang kemudian memicu krisis kemanusiaan.

**BAB 4. Implikasi Intervensi Arab Saudi terhadap *Humanitarian Crisis* di Yaman**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang implikasi dari intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman, termasuk kerugian-kerugian yang diderita masyarakat Yaman dan krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik yang terjadi.

**BAB 5. Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini yang merupakan penutup dari karya ilmiah ini.



## BAB 2

### GAMBARAN UMUM PERANG SAUDARA DI YAMAN

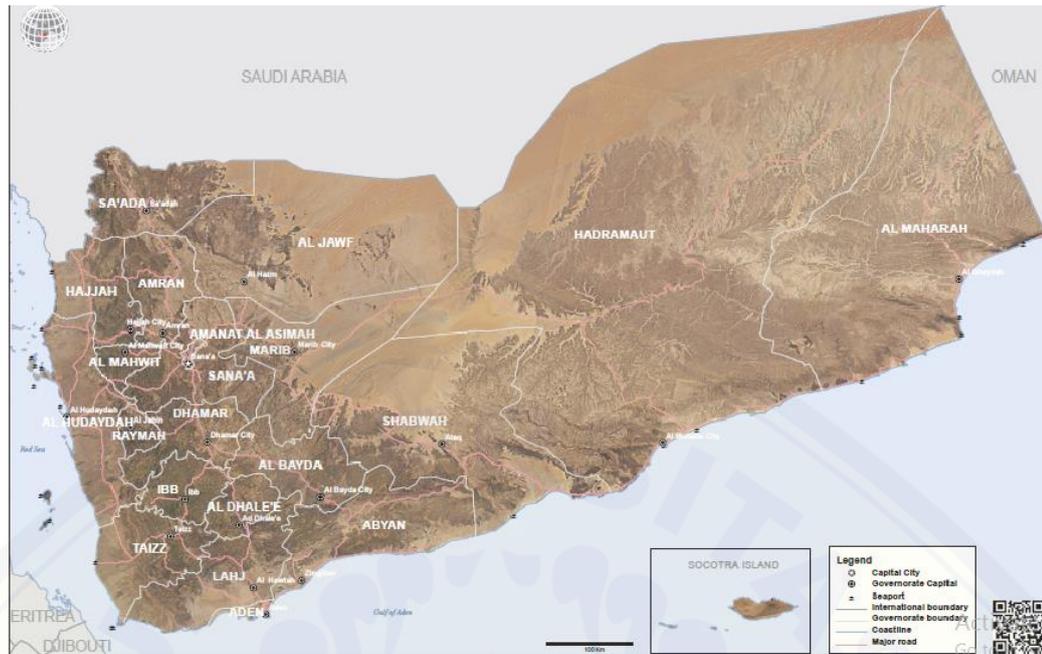
#### 2. 1. Latar Belakang Munculnya Perang Saudara di Yaman

Untuk dapat memahami pembahasan mengenai kompleksitas konflik yang terjadi di Yaman, diperlukan penjelasan mengenai gambaran umum tentang negara Yaman. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai gambaran umum kondisi di Yaman yang nantinya dapat membantu dalam menjabarkan dan memperjelas situasi konflik yang terjadi.

##### 2.1.1. Kondisi Geografi yang Tidak Subur

Secara geografis, Yaman merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah, tepatnya di ujung barat daya Semenanjung Arab yang memiliki luas wilayah total 527.970 km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 2.000 kilometer. Yaman merupakan negara kepulauan, salah satu pulau terbesar yang terpisah dari pulau utama adalah Socotra yang terletak di Laut Arab dan Kamaran di Laut Merah. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di utara, Oman di timur, Laut Arab dan Teluk Aden di selatan, dan Laut Merah di sebelah barat. Republik Yaman yang ada saat ini diciptakan pada tahun 1990 sebagai hasil dari penyatuan Republik Yaman dan Republik Demokratik Rakyat Yaman (Aquastat Survey, 2008: 1).

Dari total luas wilayah tersebut, tanah Yaman yang bisa diolah diperkirakan sekitar 3,62 juta ha, yang merupakan 7 persen dari total wilayah. Pada tahun 2004 total luas tanah untuk budidaya tanaman adalah 1,19 juta ha, dimana 81 persennya terdiri dari tanaman sementara dan 19 persen tanaman permanen. Tanaman utamanya adalah biji-bijian, mencakup sekitar 686.000 ha atau setara dengan 58 persen dari total area budidaya, dan qat yang mencakup 122. 844 ha. Untuk tanah pertanian termasuk pertanian tadah hujan dan irigasi umumnya sangat kecil dimana 62 persen lahan memiliki luas kurang dari 2 ha, sementara hanya 4 persen yang mencakup lebih dari 10 ha (Aquastat Survey, 2008: 1).



Gambar 2.1.1. Peta Administratif Yaman

Sumber: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al\\_Yemen\\_Administrative\\_Map.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al_Yemen_Administrative_Map.pdf) (2013)

Area yang ditanami sebagian besar merupakan area berlumpur, dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Tanah pertanian memiliki pH tinggi sekitar 7,8 hingga 8,0 yang menyebabkan bahan organik sangat sedikit dan hampir selalu kekurangan nitrogen dan fosfor. Sebagian besar lahan berada di dataran tinggi curam, kasar dan terkikis parah sebagai akibat dari pengembalaan berlebihan dan pembersihan vegetasi berkayu. Pertanian dibatasi untuk teras di lereng bukit dan pertanian di sisi wadi, yang ukurannya berkisar dari beberapa meter hingga lebih dari 100 meter, tergantung pada fitur geologis dan geomorfik dari wadi<sup>2</sup> (Aquistat Survey, 2008: 1). Masalah utama lain yang terkait dengan tanah adalah erosi tanah, hilangnya tutupan vegetatif, kerusakan lahan pertanian dan hilangnya daerah-daerah karena perluasan konstruksi pembangunan Yaman (*Republic of Yemen Nationa Report*, 2016: 22).

<sup>2</sup> Wadi merupakan palung sungai kering yang hanya mengandung air selama hujan lebat. (aquistat Survey, 2008: 1)

Kapasitas pertanian menjadi terbatas, terutama karena kelangkaan lahan yang bisa ditanami hanya 3% dari total area dan kelangkaan sumber daya air. Kendala lain termasuk rendahnya produktivitas sektor ini adalah diversifikasi terbatas dan kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Sebagai akibatnya, Yaman telah menghadapi penurunan yang signifikan dalam produksi pertanian yang mengakibatkan kekurangan makanan, ketergantungan yang sangat tinggi pada impor makanan, pengangguran yang tinggi, dan peningkatan kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi. Karena pertumbuhan pesat kota Sana'a dan peningkatan daerah di bawah irigasi, defisit antara permintaan air dan ketersediaan air yang terus meningkat selama bertahun-tahun telah menyebabkan penurunan jumlah air tanah dan meningkatnya kebutuhan untuk mengebor sumur yang lebih dalam. Akibatnya, air menjadi semakin mahal dan tidak dapat diakses oleh mayoritas penduduk kota. Tanpa langkah-langkah pengelolaan air, menipisnya air akan berlanjut dan akan berakibat pada ekonomi dan sosial yang parah (*Republic of Yemen National Report, 2016: 17*).

Saat ini, Yaman mengimpor 90-95% dari makanan pokoknya, sementara produksi lokal menyumbang sekitar 20-25% dari ketersediaan makanan secara keseluruhan. Negara ini diberi peringkat 11 negara yang paling tidak aman pangan secara global. Secara keseluruhan, satu dari tiga orang Yaman menderita kelaparan dimana mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakses makanan bergizi yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat dan produktif. Perlu dicatat bahwa perluasan pertumbuhan qat mempengaruhi produksi pertanian secara negatif karena eksploitasi sumber daya air yang berlebihan (*Republic of Yemen National Report, 2016: 18*).

Perang yang sedang berlangsung telah menambah ketegangan di sektor pertanian negara. Hal tersebut sangat mengganggu mata pencaharian di sektor pertanian, mengurangi aktivitas lapangan, mengganggu ekspor dan merusak rumah kaca yang merupakan sumber utama produksi sayuran. Padamnya listrik dan kurangnya bahan bakar juga mempengaruhi penyimpanan dan pengangkutan produk yang mudah rusak. Harga bahan bakar yang tinggi juga menyebabkan irigasi, transportasi dan biaya pemasaran melonjak karena biaya produksi menjadi

lebih tinggi daripada keuntungan, dimana kondisi tersebut sangat merugikan petani. Penangkapan ikan juga sangat terpengaruh oleh hal tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya bahan bakar dan listrik yang menyebabkan pembusukan, dan gangguan pasar internal dan ekspor.

Selain kondisi tanah yang kurang menguntungkan sektor pertanian, perubahan iklim juga turut menyumbang rapuhnya perekonomian Yaman. Hal tersebut terjadi karena Yaman sangat rentan terhadap dampak yang terkait dengan perubahan iklim karena perkembangan social dan ekonominya yang rapuh dan kapasitas adaptasi masyarakat yang tidak memadai. Selama beberapa dekade terakhir, suhu rata-rata tahunan di seluruh negeri telah meningkat secara signifikan. Perubahan iklim tersebut menyebabkan degradasi lahan pertanian, tanah dan teras, serta menyebabkan penggurunan, yang secara negatif mempengaruhi pendapatan pertanian untuk komunitas lokal secara khusus dan menyebabkan kerawanan pangan nasional karena tingkat produksi pangan berubah. Keadaan tersebut telah menyebabkan Yaman mengalami kekeringan dan berakibat pada kurangnya bahan pangan dan mewabahnya kelaparan, serta perusakan infrastruktur dan mata pencaharian.

Di samping itu, suhu laut yang lebih tinggi dan naiknya permukaan air laut berdampak buruk pada lingkungan pesisir dan laut yang mengakibatkan pemutihan karang dan hilangnya beberapa spesies. Wilayah pesisir Yaman terkena siklus monsun tahunan, yang telah menyebabkan beberapa badai dalam beberapa tahun terakhir yang telah melanda negara dan memiliki dampak buruk pada penduduk sekitar, infrastruktur dan mata pencaharian mereka.

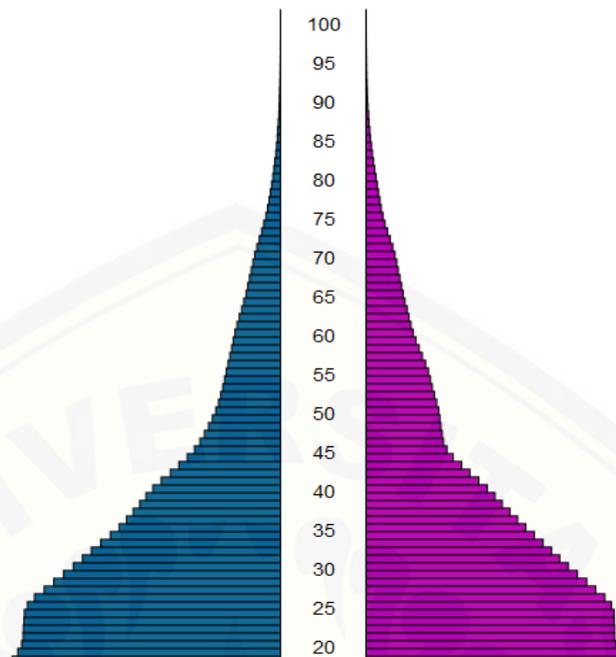
Kondisi lain yang menambah beban masyarakat Yaman adalah ketersediaan air. Dimana ketersediaan air per kapita di Yaman merupakan yang terendah di dunia. Eksploitasi air tanah telah melampaui kapasitas, menyebabkan penipisan air. Diperkirakan bahwa perubahan iklim yang dikombinasikan dengan pertumbuhan populasi yang tinggi bersama dengan pembangunan dan kebijakan pertanian yang tidak memadai serta kurangnya penegakan hukum untuk mengatur air akan memberikan tekanan yang berkelanjutan pada sumber daya air di Yaman dan berkontribusi terhadap krisis air. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya

air tanah dan naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim menyebabkan penurunan jumlah ketersediaan air tanah. Ancaman terhadap sektor air dari perubahan iklim akan memiliki implikasi serius bagi pertanian. Perubahan iklim, termasuk perubahan suhu rata-rata, curah hujan, banjir, dan kekeringan, menimbulkan tantangan untuk adaptasi pertanian di Yaman di mana air sudah langka dan cadangan air tanah menipis dengan cepat (*Republic of Yemen National Report*, 2016: 22).

Selain itu, Yaman juga menghadapi berbagai bahaya alam seperti gempa bumi, banjir bandang, dan tanah/ batu longsor. Menurut *World Disasters Report* (2000), lebih dari 50.000 orang setiap tahun terkena bencana yang dipicu oleh bencana alam di Yaman. Sebagian besar dari mereka yang terkena dampak adalah segmen rentan dari masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak. Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi di Yaman. Basis Data Bencana Internasional dari CRED menempatkan banjir sebagai empat bencana alam teratas di Yaman sejak 1990 berkaitan dengan kerusakan ekonomi (*Republic of Yemen National Report*, 2016: 23).

### **2.1.2. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi**

Sedangkan kondisi demografi di Yaman dicirikan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi yakni mencapai hingga 3% per tahun. Menurut Sensus Penduduk 2004, total populasi penduduk Yaman adalah 19.685.161 penduduk. Pada 2010, angka ini meningkat menjadi 23.154.000 penduduk, sedangkan populasi Yaman pada tahun 2018 adalah 28,92 juta. Yaman adalah salah satu negara paling terbelakang di dunia dengan sebagian besar penduduknya di daerah pedesaan dan kesukuan, dan itu terlihat dari banyaknya konflik dan perang sipil yang terjadi dalam sejarah. Dapat dilihat dari gambar 2.2 yang menjelaskan banyaknya masyarakat berusia 20-30 tahun yang mendominasi populasi di Yaman. Piramida populasi muda ini turut merupakan penyumbang tingginya tingkat pertumbuhan di Yaman. Yaman sendiri memiliki tingkat kesuburan tertinggi ke-30 di dunia dengan rata-rata 4,45 anak per wanita (*World Population Review*: 2018).



Gambar 2.1.2 Piramida Populasi Yaman 2018

*Sumber: United Nations population estimates and projection*

*<http://worldpopulationreview.com/countries/yemen-population/> (2018)*

Pertumbuhan penduduk yang cepat dianggap sebagai salah satu tantangan utama untuk pembangunan di Yaman, yang menambah ketegangan pada sumber daya alam yang langka, terutama air, dan keadaan sosio-ekonomi yang sudah lemah. Kemiskinan diwujudkan melalui situasi sosial ekonomi yang menurun, pengangguran yang tinggi, pencapaian pendidikan yang rendah, infrastruktur yang buruk serta kelangkaan sumber daya air.

### **2.1.3. Kesenjangan Pembangunan**

Kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan dalam investasi pembangunan berkontribusi lebih jauh pada kemiskinan masyarakat pedesaan yang sudah miskin. Lebih dari setengah jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dihadapkan pada situasi kekurangan total. Infrastruktur jalan yang kurang dikembangkan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan isolasi masyarakat pedesaan, membatasi akses mereka ke layanan dan peluang ekonomi

serta menghambat pergerakan orang dan barang. Migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan adalah faktor utama dari rumitnya pengaturan perkotaan Yaman. Meningkatnya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan, tidak adanya kesempatan kerja, dan faktor-faktor terkait iklim lainnya (kelangkaan air, kekeringan, dan bencana alam) dianggap sebagai alasan utama di balik meningkatnya kecenderungan migrasi pedesaan (*Republic of Yemen National Report*, 2016: 8). Tren ini menyentuh secara spesifik pada segmen pemuda dalam masyarakat Yaman. Sana'a yang merupakan kota sejarah dan ibu kota Yaman adalah tujuan utama para migran internal. Tujuan penerimaan utama lainnya adalah Aden, diikuti oleh Al-Hodeidah, Al-Mahrah, Al-Jawf, Hadramout, Shabwah dan Saadah karena adanya inisiasi berbagai proyek penemuan minyak (*Republic of Yemen National Report*, 2016: 8).

Perlu dicatat bahwa konflik bersenjata baru-baru ini mengarah pada gerakan populasi “terbalik” dari kota-kota besar (Sana'a, Aden dan Taiz) ke daerah-daerah pedesaan yang mengubahnya menjadi daerah-daerah hosting untuk Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons/IDPs*). Masuknya orang-orang yang terlantar menambah beban layanan dan infrastruktur yang ada dan sudah langka atau habis (*Republic of Yemen National Report*, 2016: 8).

Yaman memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas, ditambah dengan tantangan sumber daya air yang semakin memburuk karena perubahan iklim. Sejak terbentuknya Yaman yang bersatu pada tahun 1990, negara ini telah mengalami siklus konflik dan krisis politik. Sejak pemberontakan pada tahun 2011, negara ini menghadapi gejolak selama transisi politik yang meningkat pada tahun 2015 menjadi konflik bersenjata besar-besaran, menyebabkan kerugian moril dan materil yang besar.

## **2. 2. Perang Saudara di Yaman dan Dinamikanya**

Pergolakan politik mulai muncul di Timur Tengah akibat gelombang protes yang disebut *Arab Spring*. Gelombang protes ini muncul akibat maraknya

pelanggaran HAM, tingginya angka pengangguran, rezim yang diktator, tingginya angka kemiskinan, naiknya harga kebutuhan pokok, terlantarnya nasib buruh, dan monopoli kekayaan serta korupsi oleh para pejabat yang menyebabkan berjangkitnya “virus” revolusi di negara-negara Timur Tengah. Di Yaman, gelombang protes terjadi pada pertengahan Januari 2011 baik di bagian utara maupun selatan, dimana lebih dari 16.000 demonstran berpartisipasi dalam demonstrasi yang bertujuan untuk mendesak diakhirinya 33 tahun kepemimpinan presiden Saleh yang dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat Yaman selama pemerintahannya. Setelah aksi protes tersebut, Presiden Saleh mengumumkan bahwa dia tidak akan mengikuti pemilihan kembali pada tahun 2013, tetapi akan menjalani sisa masa jabatannya. Keputusan tersebut diambil setelah aksi demonstrasi yang menarik orang-orang dari semua kelompok kepentingan termasuk kelompok Houthi, untuk memprotes pemerintahan yang buruk dan korupsi yang telah menodai lembaga-lembaga politik Yaman di bawah pemerintahan Saleh. Para demonstran pada mulanya menginginkan pemerintah Yaman untuk memodifikasi konstitusi, menangani kasus korupsi, dan kondisi ekonomi serta masalah pengangguran. Namun, permintaan tersebut kemudian berujung pada tuntutan kepada Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur dari jabatannya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, masyarakat turun ke jalan-jalan kota-kota besar di Yaman menyerukan presiden yang berkuasa saat itu yaitu Ali Abdullah Saleh untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Saleh didorong untuk membuat beberapa konsesi ekonomi dan janji-janji politik, namun gerakannya tidak berhasil menenangkan protes-protes itu. Beberapa korban dilaporkan tewas akibat kerusuhan yang terjadi. Pada 18 Maret 2011, setidaknya 45 orang dilaporkan tewas setelah loyalis Saleh berpakaian seperti warga sipil menembaki demonstran antipemerintah di Sana'a. Hal ini membuat geram masyarakat dan pasukan keamanan negara. Meskipun demikian, pasukan keamanan militer yang kuat yang secara historis dirancang untuk setia kepada Saleh tetap utuh, terutama Garda Presiden yang merupakan unit terbesar dan dilengkapi tentara terbaik di Yaman (The War report 2017. 2017: 2).

Saleh menandatangani perjanjian yang diusulkan oleh Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council/ GCC*) untuk melangkah turun dari kekuasaan pada 23 November, setelah mengulur-ulur dan mengingkari pengumumannya beberapa kali.<sup>3</sup> Berdasarkan perjanjian tersebut, Saleh akan mentransfer kekuasaan kepada wakilnya yaitu Mansour Hadi, dengan imbalan kekebalan dari penuntutan. Kesepakatan ini dilengkapi dengan mekanisme pelaksanaan yang disponsori PBB untuk periode transisi, yang memiliki tiga tugas utama antara lain: mengadakan dialog nasional dengan tujuan menangani isu-isu politik negara dan menghasilkan konstitusi baru, menangani isu-isu keadilan transisional, dan mereformasi angkatan bersenjata menjadi militer yang bersatu. Hadi terpilih sebagai Presiden Yaman dengan 99,6 persen suara pada 21 Februari, karena menjadi satu-satunya kandidat dalam pemungutan suara. Sebagai bagian dari rencana perdamaian, semua aktor politik utama negara yang hingga saat itu menikmati status semi-legal dilegitimasi (The War report 2017. 2017: 2).

Namun, Inisiatif GCC tersebut tidak berhasil memulihkan stabilitas negara. Faktanya, perjanjian itu dianggap oleh banyak orang sebagai kesepakatan pembagian kekuasaan antara elit politik Yaman yang mengabaikan dinamika lokal dan kelompok yang terpinggirkan secara historis dan lupa untuk mengatasi situasi ekonomi negara yang sedang lesu. Dengan runtuhnya layanan sosial dan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, konflik-konflik lokal terkristalisasi dalam kekosongan keamanan yang dihasilkan dari rezim lama, dan pada gilirannya menyebabkan melemahnya identitas nasional yang mengakibatkan kelompok-kelompok anti-pemerintah diuntungkan dari kekosongan keamanan di negara tersebut dan mampu secara efektif menentang pemerintah pusat.

Selain itu, perjanjian itu juga tidak berhasil mengusir Saleh dari panggung politik. Karena meskipun telah mengundurkan diri sebagai presiden, Saleh terus bertindak sebagai kepala partai terkemuka Yaman yaitu *General People's Congress Party/ GPS* dan menikmati kesetiaan unit-unit kuat di militer. Salah satu usaha Hadi selama masa transisi adalah reformasi dan restrukturisasi tentara.

---

<sup>3</sup> Kesepakatan itu ditengahi oleh mantan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Yaman, Jamal Benomar. (The War Report 2017, 2017: 2)

Langkah ini diambil karena Hadi tidak memiliki basis dukungan yang luas baik politik maupun militer sehingga dianggap sebagai sosok yang cukup lemah, sedangkan jaringan Saleh masih beroperasi dan kuat. Hadi mencoba untuk mengekang pengaruh Saleh dengan cara mengeluarkan loyalis Saleh dan anggota keluarga dari posisi kunci di dunia militer, terutama komando Pasukan Penjaga Presiden dan Pasukan Keamanan Khusus.

Pada bulan Juni 2014, pemerintah memutuskan untuk memotong subsidi bahan bakar yang kemudian memicu gelombang protes. Hal ini menyebabkan Abdulmalik al-Houthi mengeluarkan peringatan keras akan menyerukan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Hadi jika tidak segera mengembalikan subsidi bahan bakar. Pada 18 Agustus, ribuan pendukung kelompok Houthi berbondong-bondong ke ibukota memprotes pemotongan subsidi bahan bakar dan menyerukan kepada Presiden untuk mundur dari jabatannya. Ketegangan di Sana'a memanas selama beberapa minggu berikutnya, dan pada 19 September 2014 pertempuran pecah di pinggiran ibukota antara kelompok Houthi dan unit militer di bawah komando Ali Mohsin.

Pada 21 September, kelompok Houthi menguasai Sana'a setelah pasukan Mohsin mundur di bawah instruksi dari kementerian dalam negeri. Pada hari yang sama, pemerintah menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi PBB dengan kelompok Houthi yang diberi nama *The Peace and National Partnership Agreement* (PNPA). Perjanjian tersebut melibatkan perumusan pemerintahan baru dalam satu bulan, dengan Presiden saat ini bertindak sebagai juru kunci. Presiden akan menunjuk seorang Perdana Menteri baru dalam tiga hari. Penasihat politik baru dari kelompok Houthi dan gerakan Selatan akan ditunjuk. Sebagian besar partai politik Yaman menandatangani perjanjian dan disambut oleh PBB. Selain itu, perjanjian tersebut menyerukan reformasi di sektor keamanan dan ekonomi, termasuk pemulihan kembali subsidi bahan bakar (The War Report 2017, 2017: 4).

Setelah penandatanganan PNPA, stabilitas di ibukota berhasil dipulihkan melalui penandatanganan perjanjian dan pembentukan pasukan keamanan. Namun, situasinya kembali memburuk pada 17 Januari 2015 setelah presentasi

rancangan konstitusi yang menggambarkan pengenalan sistem federal dengan enam wilayah, dimana kelompok Houthi menduduki Istana Kepresidenan dengan dukungan dari unit militer yang setia kepada Saleh. Kemudian Presiden Hadi diberi status sebagai tahanan rumah, sehingga pada 22 Januari Presiden Hadi mengajukan pengunduran dirinya dibawah paksaan bersama dengan perdana menteri Khaled Bahah dan sisa kabinetnya. Pada awal Februari, kelompok Houthi menyelesaikan pengambilalihan kekuasaan mereka dengan mengumumkan pembubaran parlemen dan mendirikan otoritas sementara yang bernama Komite Revolusioner Tertinggi (*Supreme Revolutionary Committee/SRP*), yang akan bertanggung jawab membentuk parlemen baru yang pada gilirannya akan membentuk dewan presiden untuk menggantikan Hadi (*The War Report 2017*, 2017: 4).

Pada 21 Februari atau satu bulan setelah mengundurkan diri di bawah tekanan, Hadi berhasil melarikan diri dari Sana'a dan menuju ke Aden yang merupakan tempat yang digunakan untuk mengumumkan bahwa dia masih menjabat sebagai presiden Yaman dan menyatakan semua keputusan politik yang dibuat sejak September tidak berlaku. Setelah pengumuman dibuat, beberapa negara Teluk mengumumkan relokasi kedutaan mereka ke Aden untuk memperkuat pernyataan Hadi.

Pada 19 Maret 2015, situasi kekerasan meningkat ketika pertempuran meletus antara unit militer yang setia kepada pasukan Saleh dan aliansi pasukan Hadi di Aden, dimana kediaman Hadi di kota itu dibom. Pada hari berikutnya, masyarakat yang tinggal di Sana'a menyaksikan bom bunuh diri di dua masjid Zaydi di ibukota yang menewaskan 137 orang. Setelah serangan itu tepatnya pada 21 Maret, Abdulmalik al-Houthi mengumumkan mobilisasi angkatan bersenjata untuk kampanye di Yaman selatan dengan kedok melawan *Al-Qaeda in the Arabian Peninsula/ AQAP* dan afiliasinya termasuk aliansi Hadi. Pada hari yang sama, Hadi menyatakan Aden sebagai ibukota sementara negara tersebut.

Pada tanggal 24 Maret, pemerintah Hadi meminta Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya untuk membantunya melindungi negara dari serangan kelompok Houthi. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan karena aliansi Houthi-Saleh

maju lebih jauh ke selatan dimana keadaan tersebut dapat menyudutkan posisi Hadi. Ketika pasukan Houthi-Saleh mencapai pinggiran Aden keesokan harinya, Hadi melarikan diri ke Arab Saudi. Tak lama setelah itu, koalisi Saudi yang terdiri dari sembilan negara Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Qatar dan Sudan) mengumumkan Operasi awal untuk melawan kelompok Houthi dan mengembalikan kekuasaan Hadi.

Fase terkontrol berakhir pada 26 Maret 2015 oleh intervensi militer dari koalisi pimpinan Arab Saudi. Situasi politik di Yaman mengalami gejolak akibat peralihan dari konflik internal ke tangan aktor asing. Gejolak ini memberikan efek negatif pada Yaman yang sebelumnya merupakan dua negara yang terpisah yaitu Yaman utara dan Yaman selatan. Intervensi tersebut secara efektif membagi negara tersebut ke wilayah utara dan wilayah selatan.

Pada 14 April 2015, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali dukungannya untuk legitimasi Hadi dan menuntut kelompok Houthi untuk menarik diri dari semua area yang mereka kuasai. Selain itu, PBB juga menjatuhkan sanksi embargo senjata terhadap kelompok Houthi dan pasukan yang setia kepada Saleh, serta menjatuhkan sanksi terhadap Abdulmalik al-Houthi dan putra presiden Ahmed Ali Abdullah Saleh. Pada bulan Juli, adegan perang berubah ketika loyalis Hadi dan pasukan selatan berhasil merebut kembali Aden, dibantu oleh pasukan darat dari UEA dan Arab Saudi. Namun, situasi keamanan di kota dan wilayah selatan yang lebih luas tetap rapuh, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa serangan IS yang menghantam kota itu.

Pembicaraan mengenai perdamaian yang ditengahi oleh PBB dimulai di Kuwait antara pihak Yaman dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan. Sepanjang pembicaraan ada beberapa peraturan gencatan senjata yang disepakati, dan proses perdamaian akhirnya ambruk pada bulan Agustus saat pertempuran semakin intensif. Pada tanggal 28 Juli 2016, Saleh dan Abdulmalik al-Houthi mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan melalui pembentukan Dewan Politik Tertinggi (*Supreme Political Council/SPC*) yang memiliki sepuluh anggota dengan perwakilan yang setara untuk kedua kubu. Pada tanggal 19 September, Hadi mengumumkan relokasi bank ke Aden, sehingga

mengganggu sistem ekonomi yang sudah runtuh dan mempersulit proses penyelesaian yang dinegosiasikan dengan aliansi Houthi-Saleh. Pada 28 November, SPC mengumumkan pembentukan pemerintah di bawah Abdel aziz Bin Habtour, anggota aktif *General People's Congress* yang berafiliasi dengan Saleh. Acara ini menandai pengetatan lebih lanjut dari aliansi Houthi-Saleh di tingkat politik, meskipun unit militer setia untuk Saleh dan pasukan Houthi sebagian besar tetap berbeda (The War Report 2017, 2017: 5).

### **2. 3. Dampak Perang Saudara di Yaman**

Revolusi Yaman sebagai bagian dari Arab Spring terjadi pada tahun 2011. Pada fase awal, protes di Yaman terkait dengan tidak adanya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi, korupsi dan usulan pemerintah untuk memodifikasi konstitusi Yaman. Tuntutan para pendemo kemudian berkembang dengan menyerukan agar Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri. Penyerangan secara massal dari militer maupun dari pemerintahan Saleh, secara efektif menjadikan banyak wilayah negara berada diluar kendali pemerintah, dan para pendemo bertekad untuk menentang otoritasnya. Demonstrasi oleh 16.000 demonstran dilaksanakan di ibukota Yaman, pada 27 Januari 2011 (Nur Andini, 35: 2016).

Menanggapi aksi tersebut, pada tanggal 2 Februari Saleh mengumumkan bahwa dia tidak akan mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2013 dan dia tidak akan mewariskan kekuasaannya pada putranya. Pada tanggal 3 Februari, 20.000 massa memprotes pemerintah di Sana'a, sementara itu demonstrasi yang lain juga terjadi di Aden, sebuah kota pelabuhan di Yaman selatan. Selanjutnya, pada tanggal 18 Februari 10 ribu penduduk Yaman mengambil bagian dalam demonstrasi anti pemerintah di Taiz, Sana'a dan Aden. Aksi terus berlanjut di Yaman dan pada tanggal 11 Maret, tiga orang terbunuh dalam demonstrasi yang menuntutnya mundurnya Presiden Saleh. Demonstrasi yang lain pun juga dilakukan di kota-kota lain, termasuk Al Mukalla, dimana satu orang terbunuh. Pada tanggal 18 Maret, para pendemo di Sana'a ditembaki yang menyebabkan 52 orang meninggal.

Pada akhir April 2011, Saleh yang awalnya menyetujui sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Dewan Kerjasama Teluk, yang kemudian mundur lagi beberapa jam sebelum jadwal penandatanganan, sampai tiga kali. Setelah ketiga kalinya pada 22 Mei 2011, GCC mengumumkan penangguhan upaya-upaya untuk memediasi di Yaman. Pada 23 Mei 2011, sehari setelah Saleh menolak untuk menandatangani perjanjian transisi tersebut, Syeikh Sadiq al-Ahmar ketua federasi suku Hasyid, salah satu dari suku-suku yang paling kuat di negara itu, mengumumkan dukungannya pada oposisi dan para pendukungnya yang bersenjata memulai konflik dengan pasukan keamanan loyalis di ibukota Sana'a. Pertempuran jalanan yang hebat terjadi, termasuk tembakan artileri dan mortar. Saleh dan beberapa orang lain terluka dan setidaknya lima orang meninggal pada saat terjadi pemboman istana Presiden pada 3 Juni 2011 ketika sebuah bahan peledak menghancurkan sebuah masjid yang digunakan oleh para pejabat pemerintah tingkat tinggi.

Selama bertahun-tahun, Yaman dirongrong oleh berbagai kelompok militan yang bertikai satu sama lain, diantaranya kelompok Syiah al-Houthi yang menguasai provinsi di sebelah Utara Yaman, gerakan separatis di wilayah Selatan, al-Qaeda di Semenanjung Arab, faksi-faksi dalam militer dan ditambah lagi dengan simpatisan mantan Presiden Ali Abullah Saleh yang lengser dari jabatannya pada revolusi Yaman 2011 silam. Korupsi, kesenjangan sosial, lemahnya kontrol pemerintah, kemiskinan serta minimnya infrastruktur merupakan hal utama yang menyebabkan gerakan separatis tumbuh subur di Yaman. Protes rakyat Yaman pada tahun 2014, merupakan sederetan aksi-aksi demonstrasi di Yaman yang akhirnya meningkat menjadi konflik bersenjata. Protes tersebut dimulai pada tanggal 18 Agustus 2014, saat terjadi serangkaian demonstrasi Houthi di Sanaa menolak kenaikan harga BBM. Dimana pada saat itu, kenaikan harga BBM hampir 100% akibat keputusan pemerintah Yaman pada 29 Juli 2014 untuk memotong subsidi BBM. Sebagai tanggapan atas pemangkasan subsidi tersebut, Houthi memulai protes untuk mengembalikan subsidi dan pembentukan pemerintahan baru. Lalu pada waktu yang sama, Houthi juga mendirikan markas protes di Sanaa. Puluhan ribu orang berpartisipasi dalam

protes tersebut, yang segera diikuti dengan adanya kekerasan. Pada 10 September 2014, tujuh orang pendemo ditembak oleh pasukan keamanan. Pertentangan yang terjadi lagi pada 18 September, menyebabkan 40 pendemo dan anggota milisi Sunni meninggal. Pada tanggal 19 September 2014, pemberontak Houthi kembali menyerang dan mengambil alih Sanaa, maju memasuki kota tersebut dan menduduki kantor-kantor pemerintahan. Pertempuran tersebut menyebabkan kematian 123 orang dari kedua belah pihak. Protes tersebut terjadi mengikuti suatu fase ekspansi Houthi yang berpuncak pada pengambilan alih Amran sebuah ibukota provinsi, oleh Houthi pada 8 Juli 2014. Dilanjut dengan aksi pada tanggal 22 September, dimana sedikitnya 240 orang terbunuh dalam pertempuran di Sanaa.

Ketidakstabilan politik dan konflik di Yaman juga menyebabkan perpindahan skala besar. Ketidakstabilan politik dan kekerasan sporadis yang terjadi terus melemahkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, memperburuk marginalisasi dan kerentanan orang-orang yang sudah miskin, terutama para pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan secara internal. Menurut UNHCR, konflik di Yaman pada tahun 2012 telah memicu gelombang besar perpindahan baik di wilayah Sa'ada, Hajjah, Amran dan Sana'a. Hingga Desember 2012, terdapat sekitar 358.000 pengungsi terdaftar di Yaman utara (UNHCR, 2013: 4).

Krisis politik dan bentrokan yang terjadi memperburuk situasi kemanusiaan Yaman. Banyak pengungsi menyatakan keinginan mereka untuk kembali. Namun, tantangan utama menghambat kembalinya pengungsi termasuk diantaranya adalah hancurnya rumah dan bangunan umum, keberadaan ranjau darat, lemahnya kehadiran otoritas Negara dan tidak adanya aturan hukum, layanan dasar dan peluang mata pencaharian. Mereka hanya akan siap untuk kembali begitu infrastruktur dasar telah dibangun kembali dan keamanan ditingkatkan, terutama dalam kaitannya dengan ranjau darat dan bahan peledak lainnya. Hambatan utama untuk pengembalian berkelanjutan adalah: kurangnya layanan dasar, infrastruktur, dan keamanan; rumah hancur yang perlu dibangun kembali; tidak adanya otoritas penegakan hukum Yaman; dan kendala keuangan (UNHCR, 2013: 4).

Sebelum adanya intervensi Arab Saudi, Yaman telah mengalami kesengsaraan ekonomi sejak penyatuan Utara dan Selatan pada tahun 1990. Antara 2007 dan 2009, krisis makanan, bahan bakar, keuangan yang mendatangkan malapetaka pada perekonomian negara, dengan konsekuensi bagi ekonomi makro serta kehidupan masyarakat Yaman. Ditambah dengan tantangan ekonomi seperti pengangguran kaum muda, pembangunan daerah yang tidak merata, kerawanan pangan, sistem perlindungan yang luas, dan ketergantungan yang berlebihan pada minyak untuk pendapatan pemerintah karena selain minyak dan gas, Yaman memiliki sumber daya alam yang terbatas, termasuk air. Dan perang saudara yang terjadi hanya memperburuk beberapa masalah ekonomi yang disebutkan di atas.

Pada tahun 2011, krisis politik dan keamanan menyebabkan ekonomi masuk ke dalam resesi, dan PDB menyusut 12,7 persen. Ekonomi pulih perlahan, tumbuh 2,4 persen pada 2012 dan 4,8 persen pada 2013. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi sekitar 0,3 persen karena produksi minyak dibatasi oleh sabotase infrastruktur dan kekurangan bahan bakar yang parah serta pemutusan aliran listrik yang meluas secara serius mengganggu kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi makro terus-menerus terancam oleh ketidakamanan dan ketidakstabilan politik, yang merupakan penyebab utama sabotase infrastruktur minyak yang telah mengurangi produksi hidrokarbon dan, karenanya pendapatan ekspor yang merupakan sumber terpenting pendapatan pemerintah menurun. Selain itu, sistem subsidi energi saat ini menyerap sebagian besar pendapatan fiskal, mengkompromikan kesinambungan fiskal dan menyisakan sedikit ruang untuk investasi infrastruktur dan pengeluaran sosial yang meningkatkan pertumbuhan yang sangat dibutuhkan (World Bank, 2015: 11).

Pada 2011, ekonomi mengalami kontraksi lebih dari 12 persen karena kerusuhan politik. Ketidakstabilan dan ketidakpastian yang terus-menerus telah menandai beberapa tahun terakhir di bawah pemerintahan transisi. Konflik sipil yang berkelanjutan telah dikaitkan dengan munculnya al-Qaeda di Semenanjung Arab dan berlanjutnya perselisihan sipil, terutama dengan kelompok-kelompok

separatis selatan dan gerakan Houthi di Saada yang menyebabkan perekonomian negara melemah (World Bank, 2015: 12).

Diperkirakan 14,7 juta orang terpengaruh oleh krisis kemanusiaan dan membutuhkan beberapa bentuk bantuan kemanusiaan. Keterbelakangan dan sistem pemerintahan yang buruk, tekanan lingkungan, tekanan demografis dan politik berkelanjutan yang menyebabkan ketidakstabilan berkontribusi pada kerentanan. Kemiskinan ekstrem yang ditopang oleh peluang mata pencaharian terbatas menyebabkan kerawanan pangan dan gizi buruk yang memengaruhi banyak warga Yaman. 4,5 juta dari orang-orang rawan pangan sangat rawan pangan. Kurangnya layanan dasar masyarakat, otoritas negara yang lemah dan manajemen sumber daya yang buruk juga berkontribusi pada kerentanan di Yaman. Sekitar 13 juta orang Yaman tidak memiliki akses ke sumber air yang lebih baik, dengan daerah pedesaan yang paling parah terkena dampaknya. Pemerintah daerah yang terfragmentasi atau tidak ada dan rasa tidak aman merusak aturan hukum di banyak bidang dan hak asasi manusia masih tersebar luas (UNOCHA, 2013: 9).

Penurunan kondisi kemanusiaan setelah krisis politik 2011, membuat Yaman lebih banyak membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Yaman dalam langkah pertama menuju pemulihan. Krisis yang terjadi di bawah pembangunan dan tata kelola yang buruk, tekanan lingkungan, tekanan demografis dan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan, konflik dan kemiskinan membuat Yaman terpuruk. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini membuat sejumlah pria, wanita dan anak-anak Yaman yang tidak dapat mengakses layanan dasar, melindungi hak asasi manusia mereka yang fundamental, atau pulih dari krisis. Diperkirakan 90% dari total kebutuhan pangan dipenuhi melalui makanan impor. Yaman juga mengandalkan minyak untuk 90% dari pendapatan eksportnya, membuat perekonomian sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Ini menambah lapisan risiko tambahan bagi keluarga yang sudah berjuang untuk membeli makanan. Kemiskinan dan kurangnya mata pencaharian dan pendapatan yang berkelanjutan adalah hambatan

utama untuk membangun ketahanan di antara yang terkena dampak krisis. Dengan begitu banyak orang yang membutuhkan, perbaikan yang berarti hanya dapat terjadi secara bertahap melalui kombinasi manajemen sumber daya yang lebih baik, dukungan mata pencaharian, dan pada saat yang sama, bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan untuk yang paling rentan (UNOCHA, 2013: 6).

Di daerah-daerah yang terkena dampak konflik, kemunduran ini disebabkan oleh kerusakan yang luas pada infrastruktur dan pemindahan sosial, sementara kurangnya pendapatan pemerintah, tata kelola yang buruk, jangkauan pemerintah yang buruk dan kurangnya investasi di sektor sosial terus memperburuk kondisi negara tersebut. Kekhawatiran utama lainnya adalah kurangnya otoritas negara di beberapa bidang, dengan pemerintah tidak mampu memberikan aturan hukum dan keamanan yang efektif. Tanpa bantuan lembaga hukum yang dapat diandalkan, Yaman sangat rentan terhadap pelanggaran hak, termasuk kekerasan, perekrutan anak oleh angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, kekerasan berbasis gender, dan eksploitasi seksual dan ekonomi (UNOCHA, 2013: 6).

Akses kemanusiaan yang sulit tetap menjadi hambatan penting dalam operasi kemanusiaan di Yaman. Konflik bersenjata, terorisme, kejahatan, kerusuhan sipil, bahaya alam dan pos pemeriksaan ilegal mencegah akses kemanusiaan. Di Utara, tantangan akses di wilayah Haji terutama disebabkan oleh pos-pos pemeriksaan ilegal yang membatasi pergerakan, dan juga ranjau. Di Sa'ada, Al Jawf, dan bagian-bagian dari wilayah Amran, otoritas lokal menghambat akses dengan membatasi pergerakan tanpa pendamping di area-area di bawah kendali mereka. Otoritas ini terkadang juga mengganggu pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, termasuk pemilihan penerima manfaat. Gangguan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tentang ketidakberpihakan, netralitas dan kemandirian aksi kemanusiaan. Di Selatan, permusuhan aktif dan konflik bersenjata menghambat operasi kemanusiaan di Abyan, dan pada tingkat yang lebih rendah di beberapa bagian dari Gubernur Shabwah. Abyan memiliki tingkat kebutuhan kemanusiaan yang sangat tinggi; artinya kesulitan akses memiliki efek nyata pada kesejahteraan ratusan ribu orang. (UNOCHA, 2013: 20)

Hambatan Birokrasi dimana sikap birokrasi yang rumit menghambat terciptanya iklim kerjasama yang kondusif di antara sesama anggota organisasi internasional maupun antar organisasi internasional. Pengajuan visa yang rumit untuk staf asing membuang-buang waktu, membuang-buang biaya yang sangat besar dan menghilangkan kesempatan. Selain itu, ketidakjelasan regulasi yang meliputi kerangka, arah kebijakan, dan peraturan Organisasi Internasional menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, dan tumpang tindihnya berbagai aturan dalam kesepakatan Organisasi Internasional tersebut, serta struktur yang tidak jelas. (UNOCHA, 2014: 15)

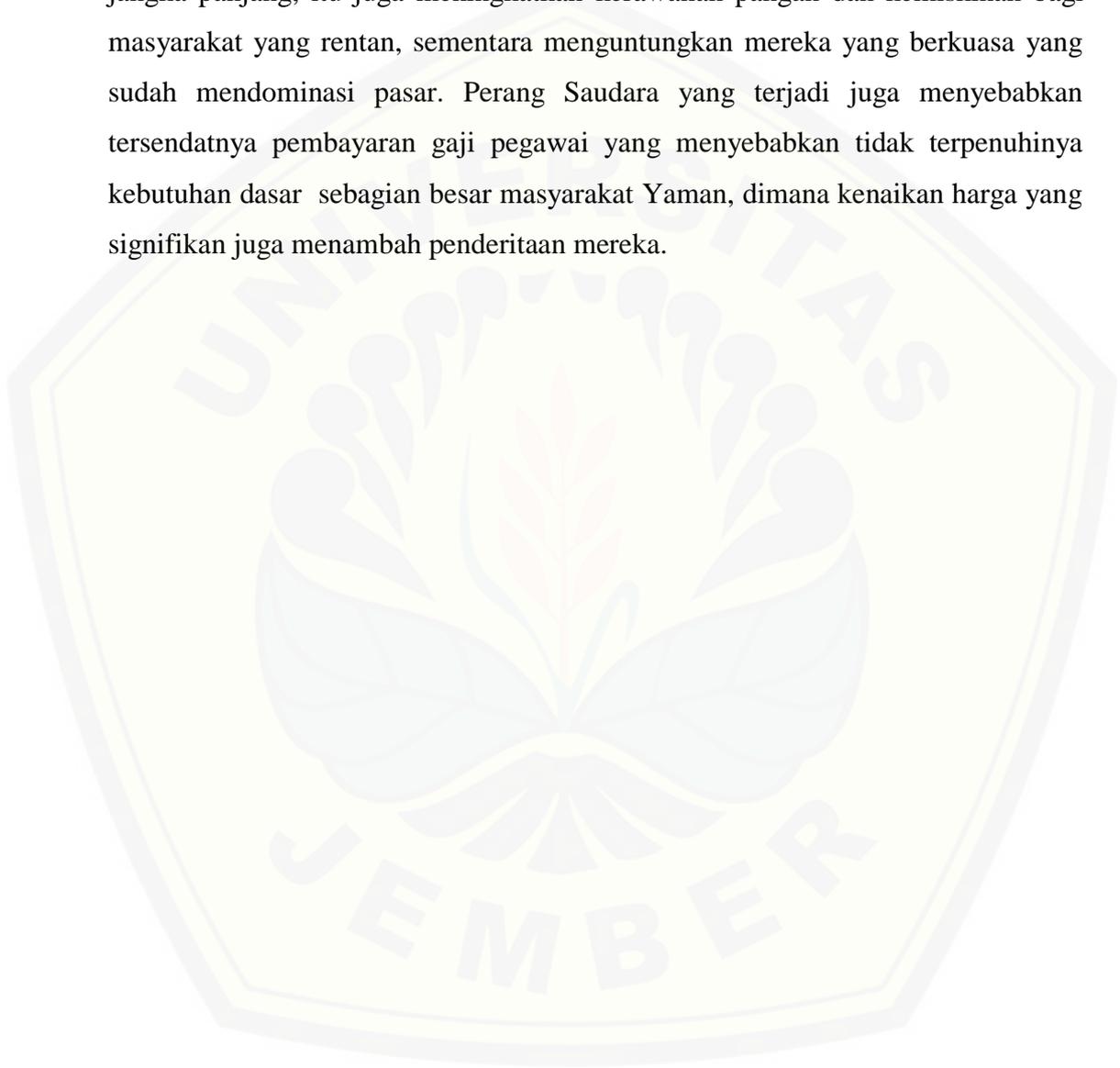
Kendala akses kemanusiaan di Yaman pada 2013 bervariasi dari masalah yang terkait dengan memperoleh visa bagi pekerja kemanusiaan membawa peralatan terkait keamanan ke negara untuk mengakses kendala yang disebabkan oleh rasa tidak aman dan konflik. Ada juga penolakan akses langsung dari aktor non-negara. Di utara negara itu, ada masalah dengan penilaian, distribusi, dan aspek-aspek lain dalam memberikan bantuan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di selatan, ada masalah terkait dengan kurangnya aturan lembaga hukum dan keamanan untuk organisasi kemanusiaan.

Ketidakamanan dan konflik yang terjadi tidak hanya menyebabkan penderitaan manusia, tetapi juga berdampak pada kemampuan organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan. Sehubungan dengan akses dan keamanan pekerja kemanusiaan, ketidakamanan tetap menjadi masalah dan menghambat akses bantuan kemanusiaan. Demikian juga dengan ancaman penculikan dan kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan dan penjarahan aset akan tetap terjadi di seluruh negeri. Konflik yang terjadi terus menempatkan warga sipil dan pekerja kemanusiaan berada dalam situasi bahaya. Pembatasan perpindahan agen, personel atau barang ke Yaman menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Selain itu, operasi militer dan permusuhan berkelanjutan juga menghambat operasi kemanusiaan. Ditambah dengan kekerasan yang dilakukan terhadap personil kemanusiaan, dan perampasan aset dan fasilitas.

Perang Saudara yang terjadi di Yaman telah memperburuk kondisi negara yang sebelumnya telah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan negara. Kondisi sosial dan ekonomi Yaman yang rapuh dan perang saudara itu sendiri telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Yaman meningkat secara drastis, dan terus memburuk sebagai akibat dari konflik yang terus berlanjut. Sebagaimana dengan penduduk Yaman yang menjadi lebih putus asa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka juga menjadi semakin rentan terhadap manipulasi dan dukungan dari pihak lain. Hal ini menyebabkan munculnya banyak penduduk yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dasar untuk melawan kejahatan, membawa senjata untuk melindungi diri mereka sendiri, atau bahkan mungkin menyelaraskan diri dengan kelompok bersenjata atau pihak lain dalam konflik jika mereka merasa hal tersebut dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, Pemuda di Yaman juga sangat rentan terhadap perekrutan oleh kelompok bersenjata, dan remaja perempuan juga dihadapkan pada pernikahan dini dan pernikahan paksa karena ketegangan keuangan atau pembayaran hutang keluarga. Di tengah gejolak ini, pengaruh kelompok ekstrimis seperti AQAP dan IS juga semakin meningkat.

Para ahli setuju bahwa PDB Yaman telah menyusut secara signifikan hingga 35% dan terjadi kenaikan inflasi yang tinggi. Subsidi bahan bakar yang menghabiskan 30% dari anggaran nasional telah dihapuskan oleh kelompok Houthi yang sebelumnya telah memprotes pemotongan subsidi pada tahun 2014. Menurut data *Central Bank of Yemen*, pendapatan ekspor minyak turun dari 2,6 Milyar dolar pada tahun 2013 menjadi 1,6 Milyar dolar pada tahun 2014 akibat jatuh tempo ladang minyak, sabotase, dan penurunan harga minyak. Pengangguran meningkat seiring dengan kerusakan yang terjadi pada lapangan kerja. Pendapatan dari ekspor hidrokarbon (minyak dan gas) yang pernah menyumbang dua pertiga dari pendapatan negara juga menurun drastis dimana hampir 90% dari pendapatan ekspor menghilang. Sementara harga minyak internasional yang rendah mengurangi pendapatan negara dari ekspor minyak (BTI 2018 Country Report-Yemen, 2018: 27).

Ekonomi negara yang lumpuh juga mendukung ekonomi bayangan yang tumbuh subur di Yaman yang memecah struktur kekuasaan di kedua pihak yang terlibat konflik karena para pemangku kepentingan terlibat dalam pencarian keuntungan perang. Tidak hanya akan mengurangi peluang untuk bersatu dalam jangka panjang, itu juga meningkatkan kerawanan pangan dan kemiskinan bagi masyarakat yang rentan, sementara menguntungkan mereka yang berkuasa yang sudah mendominasi pasar. Perang Saudara yang terjadi juga menyebabkan tersendatnya pembayaran gaji pegawai yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagian besar masyarakat Yaman, dimana kenaikan harga yang signifikan juga menambah penderitaan mereka.



### **BAB 3**

## **INTERVENSI ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI YAMAN**

Perang saudara yang terjadi di Yaman berdampak pada masyarakat Yaman. Perang saudara yang terjadi di Yaman tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur akibat senjata yang digunakan, namun juga berdampak pada melemahnya perekonomian negara. Selain itu, kelompok Houthi yang semakin tidak terkendali juga menyudutkan pemerintahan resmi Yaman yang diakui secara Internasional.

### **3. 1. Intervensi Arab Saudi di Yaman**

Pemerintah pusat Yaman yang dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah berlangsung puluhan tahun mulai retak pada tahun 2011, ketika kerusuhan politik meletus di seluruh wilayah Arab. Meningkatnya kerusuhan politik dan keamanan yang memperkuat elemen teroris membuat Arab Saudi dan anggota masyarakat internasional lainnya berusaha untuk menjadi perantara dalam kompromi politik, yang kemudian berujung pada sebuah transisi dimana pada tahun 2012 Wakil Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi diangkat menjadi presiden Yaman. Selanjutnya, sepanjang tahun 2013 pemerintah Yaman mengadakan Konferensi Dialog Nasional yang bertujuan untuk mencapai konsensus nasional mengenai tatanan politik baru. Namun, pada Januari 2014 konferensi tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Kemudian, dalam beberapa minggu setelah konferensi nasional berakhir, kelompok Houthi melancarkan serangan militer terhadap sekutu Presiden Hadi. Kelompok ini mulai bergerak menyerbu ibukota Yaman pada September 2014. Menanggapi serangan ini, pemerintah mengadakan Perjanjian Perdamaian dan Kemitraan Nasional, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menetapkan pembentukan pemerintah sementara termasuk penasihat dari Houthi dan Gerakan Selatan (Sharp, 2018: 1).

Namun, Kelompok Houthi melanggar perjanjian dan melakukan serangan terhadap pemerintah resmi Yaman, serta menempatkan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi, Perdana Menteri Khaled Bahah dan beberapa menteri kabinet di

bawah tahanan rumah pada Januari 2015, yang berakhir pada pengunduran diri dibawah tekanan dan mempercepat krisis konstitusi. Houthi mengambil kesempatan tersebut untuk memberhentikan pemerintah dan membentuk badan eksekutif yang dikenal sebagai Komite Revolusi Tertinggi, yang diketuai oleh Mohammed Ali al-Houthi (*The War Report* 2017, 2017: 4).

Meskipun pada akhirnya Presiden Hadi berhasil melarikan diri ke Aden di Yaman selatan, posisinya menjadi tidak dapat dipertahankan karena pasukan Houthi maju dari ibu kota sampai ke Aden. Selain itu, Pemerintahan bentukan kelompok Houthi pun tidak mendapatkan dukungan dari warga Yaman yang menyebabkan situasi di Sana'a semakin memburuk, dan memaksa Presiden Hadi untuk melarikan diri dari Sana'a dengan bantuan Dewan Keamanan PBB. Namun kemudian, pada bulan Februari 2015 Presiden Hadi menarik pengunduran dirinya dan mengumumkan Aden sebagai ibu kota sementara Yaman serta meminta bantuan Arab Saudi dan negara-negara teluk untuk memulihkan kekuasaannya di yaman.

Dalam perang saudara yang semakin meluas dan tidak terkontrol, Presiden Hadi meminta bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara teluk untuk memulihkan kekuasaannya di Yaman. Presiden Hadi melayangkan surat dan menceritakan keadaan Yaman yang telah berada di ambang kehancuran. Setelah menerima surat permintaan bantuan tersebut, Arab Saudi membentuk sebuah koalisi pada bulan Maret 2015, dan meluncurkan sebuah operasi militer yang bertujuan memulihkan kekuasaan Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi. Koalisi tersebut meliputi Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, dan Sudan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Arab Saudi dan sekutunya meluncurkan intervensi militer untuk memulihkan pemerintahan Presiden Hadi dan mencegah Aden jatuh ke kelompok Houthi. Peristiwa ini menandai dimulainya Intervensi di Yaman, yang telah menewaskan ribuan orang dan memicu krisis kemanusiaan yang luas. Negara-negara yang tergabung dalam koalisi inipun turut meluncurkan pesawat-pesawatnya dalam operasi militer tersebut. Selain itu, kendaraan lapis baja, tank, dan kendaraan pengangkut personel juga dikerahkan untuk melancarkan operasi ini. Intervensi yang

dilakukan oleh Arab Saudi dan koalisinya ini termasuk serangan dan blokade yang dilakukan di wilayah darat, laut, dan udara.

### 3.1.1. Intervensi di Wilayah darat

Koalisi memulai intervensi melawan kelompok Houthi pada 26 Maret 2015, dan mulai melakukan blokade darat, laut dan udara. Dalam melancarkan intervensinya, Arab Saudi dan koalisinya meluncurkan senjata peledak yang mencakup berbagai persenjataan, tetapi di Yaman istilah ini sebagian besar mengacu pada sistem penembakan tidak langsung seperti roket dan mortir. Senjata-senjata ini bertanggung jawab atas 23 persen dari kematian dan luka-luka warga sipil yang tercatat akibat senjata peledak di Yaman. *Action on Armed Violence* (AOAV)<sup>4</sup> mencatat 1.037 kematian dan luka-luka warga sipil dari penggunaan peluru artileri, mortir dan roket di Yaman hingga 31 Juli 2015. Secara total, 1.104 kematian dan cedera dicatat yang berarti bahwa warga sipil merupakan 94 persen dari catatan kematian dan cedera akibat senjata peledak yang diluncurkan. Senjata-senjata ini telah ditembakkan ke daerah-daerah berpenduduk di Yaman oleh pasukan negara dan non-negara (AOAV, 2015: 10).

Tiga perempat dari insiden yang diluncurkan terjadi di daerah-daerah berpenduduk, kebanyakan di kota-kota selatan seperti Aden dan Taizz. Warga sipil di kota pelabuhan Aden juga telah berulang kali dilanda hujan roket yang ditembakkan dari berbagai peluncur. Senjata medan perang ini umumnya dilaporkan sebagai roket 'Katyusha', sistem senjata ini dapat menembakkan sejumlah besar amunisi dalam waktu singkat. Pada 6 Mei, setidaknya 32 warga sipil tewas dan 67 lainnya terluka oleh senjata peledak ketika mereka berusaha melarikan diri dari pertempuran di Aden. Warga dan saksi mata melaporkan bahwa serangkaian mortir jatuh secara acak ketika ratusan orang berkumpul di sebuah kamp pengungsi di sebuah pelabuhan. Penduduk telah mencoba untuk naik ke kapal tongkang untuk melarikan diri di atas laut ketika roket jatuh.

---

<sup>4</sup> *Action on Armed Violence* (AOAV) adalah organisasi amal yang berbasis di Inggris yang bekerja untuk mengurangi bahaya dan membangun kembali kehidupan yang terkena dampak kekerasan bersenjata. AOAV bekerja dengan komunitas yang terkena dampak kekerasan bersenjata, menghilangkan ancaman senjata, mengurangi risiko yang memicu kekerasan dan konflik, dan mendukung pemulihan korban dan penyintas. (AOAV, 2015: 3)

Banyak korban yang dilaporkan adalah perempuan dan anak-anak. Pada tanggal 1 Juli di malam hari, antara 15 sampai 20 roket diluncurkan ke Aden, di mana roket-roket tersebut jatuh di area yang luas. Serangan itu menghantam dua lingkungan padat penduduk yang dikenal sebagai Blok 4 dan 5. Secara keseluruhan setidaknya 18 warga sipil tewas menurut petugas kesehatan di Aden (AOAV: 2015).

Rumah sakit di kota itu dipenuhi oleh warga sipil yang cedera. Roket pertama jatuh di dekat penjara pusat di Mansoura yang terletak diantara dua pos pemeriksaan. Satu warga sipil dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka. Ketika orang-orang muncul ke jalan utama untuk membantu korban, roket kedua mendarat di jalan, menabrak sebuah pompa bensin. Roket ketiga mendarat tak lama setelah dua roket pertama. Roket tersebut menghantam atap Hotel Infinity di dekatnya, yang pada waktu itu adalah rumah bagi ratusan orang yang terlantar akibat kekerasan eksplosif. Satu jam kemudian, roket keempat menghantam lantai empat Hotel Royal Concorde di dekatnya. Beberapa roket lagi menghantam area yang sama beberapa jam kemudian. Sekitar pukul 5.30 pagi, sebuah roket menghantam sebuah rumah dua lantai yang berjarak 40 meter dari Infinity Hotel. Roket dan mortir telah menabrak fasilitas rumah bagi orang yang mencari perlindungan dan berlindung dari serangan ledakan. Menjelang malam 4 Juli, sebuah roket menghantam bagian depan bangunan TK Al Tadamon di Aden. Dua belas pengungsi yang tinggal di dalamnya terbunuh, termasuk lima anak-anak. Taman Kanak-kanak tersebut telah menjadi rumah selama dua bulan bagi 94 pengungsi, termasuk sepuluh keluarga (AOAV, 2015: 11).

Selain senjata peledak roket dan mortir yang diluncurkan oleh koalisi Arab Saudi, perangkat peledak yang ditingkatkan (*Improvised Explosive Device/IED*) yang pada dasarnya adalah bom rakitan juga digunakan oleh aktor bersenjata non-negara. Yaman telah mengalami beberapa serangan yang sangat merusak menggunakan alat peledak improvisasi (IED). *Action on Armed Violence* (AOAV) mencatat 20 serangan IED di Yaman selama tujuh bulan pertama pada tahun 2015. Serangan-serangan ini bertanggung jawab atas 17 persen kematian dan cedera warga sipil di Yaman pada tahun 2015. IED telah membunuh dan

melukai 848 orang, 774 di antaranya adalah warga sipil. Tiga perempat dari semua serangan IED di Yaman hingga 31 Juli 2015 telah terjadi di daerah-daerah berpenduduk (AOAV, 2015: 13).

Selain diluncurkan pada daerah berpenduduk, serangan juga diluncurkan di Masjid yang terletak di Sana'a. Jumlah korban sipil terbesar dari satu serangan senjata peledak di Yaman dalam tujuh bulan pertama 2015 terjadi pada 20 Maret dalam rangkaian bom bunuh diri yang terkoordinasi di kota Sana'a. Setidaknya 137 orang tewas dan 345 lainnya luka-luka dalam ledakan tersebut. Setidaknya 13 anak termasuk di antara yang tewas. Empat pembom bunuh diri menyerang masjid Badr dan al-Hashoosh ketika sebagian besar jamaah memulai shalat Jumat. Di masjid Badr, di selatan Sana'a, seorang pria memasuki gedung dan meledakkan bomnya di antara kerumunan. Ketika orang-orang berlari ke pintu keluar, ledakan kedua terjadi di dekat gerbang utama (AOAV, 2015: 13).

Yaman telah terpecah oleh penggunaan senjata peledak di daerah berpenduduk di seluruh negeri sejak tahun 2015. Senjata peledak tersebut tidak hanya menyebabkan kematian dan cedera ribuan warga sipil, tetapi mereka juga telah membantu menyeret negara itu ke dalam krisis. Penggunaan senjata peledak dengan efek area luas di daerah berpenduduk memiliki dampak yang menghancurkan bagi warga sipil di Yaman. Ratusan rumah dan bangunan telah hancur atau rusak parah. Rumah sakit, sekolah dan bantuan kemanusiaan telah dihambat, diblokir atau ditutup. Pemboman yang meluas di kota-kota di Yaman akan menghasilkan kontaminasi luas dari sisa-sisa perang, menempatkan warga sipil dalam risiko selama bertahun-tahun, bahkan mungkin beberapa dekade yang akan datang.

Selain melakukan serangan masif, Arab Saudi dan koalisinya juga menempatkan pasukan militer gabungan di setiap wilayah yang dianggap vital seperti perbatasan wilayah, ibu kota negara, pelabuhan, dan bandara. Ranjau darat juga disebar termasuk ranjau anti-personil di Abyan, Aden, Marib, Lahj dan Taizz. Ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang menewaskan sedikitnya 23 orang dan melukai orang lain, termasuk dua personel penghapus ranjau. *Human Rights*

*Watch* percaya bahwa jumlah aktual korban ranjau di Yaman mungkin jauh lebih tinggi (Sharp, 2018: 4).

Selain itu, petugas kesehatan dan pekerja kemanusiaan juga mejadi korban dalam perang ini. Selama 2015, setidaknya tiga staf *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dan dua staf *Yemen Red Crescent* (YRCS) terbunuh saat terlibat dalam operasi kemanusiaan. Pada 31 Juli, Palang Merah Inggris melaporkan bahwa seorang pasien yang terluka meninggal ketika ambulans YRCS ditembak di Taizz. Kelompok Houthi dan sekutunya yang terlibat dalam operasi militer di sekitar Aden, Taizz dan wilayah lainnya dan pasukan-pasukan Selatan yang berlawanan berulang kali membuat rumah sakit, pasien, dan pekerja kesehatan menghadapi risiko berbahaya dan situasi yang mencekam. Dalam satu kasus di Aden, pasukan Selatan mencari perlindungan di sebuah rumah sakit yang kemudian membahayakan staf kesehatan dan pasiennya. Setidaknya dua warga sipil tewas dan seorang perawat terluka. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), per September 2015, setidaknya 160 fasilitas kesehatan telah ditutup karena rasa tidak aman yang disebabkan oleh konflik (AOAV: 2015).

### **3.1.2. Intervensi di Wilayah Udara**

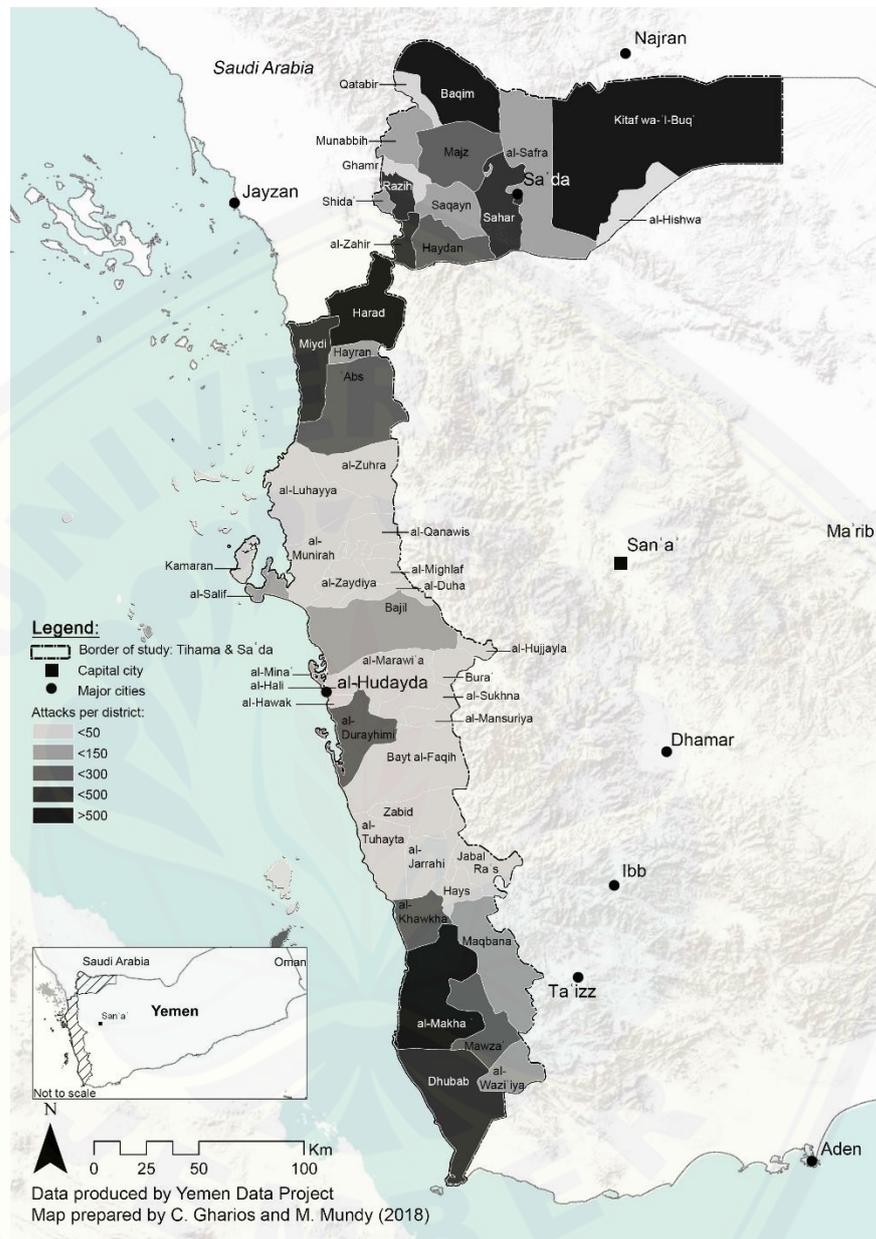
Selain wilayah darat, serangan juga dilakukan oleh koalisi Arab Saudi di wilayah udara, dimana senjata peledak juga diluncurkan melalui pesawat terbang. Mayoritas kematian dan luka-luka warga sipil yang dilaporkan dari ledakan di Yaman 60 persen disebabkan oleh senjata peledak yang diluncurkan dari udara seperti rudal dan bom yang diluncurkan dari pesawat besar. AOAV mencatat total 3.287 kematian dan luka-luka di Yaman akibat senjata peledak yang diluncurkan dari udara udara. Dari jumlah tersebut, 82 persen dilaporkan adalah warga sipil. Dari serangan udara yang dimulai di Yaman pada 26 Maret 2015, ada beberapa serangan udara yang mengakibatkan sejumlah besar kematian dan cedera warga sipil, seperti pemboman sebuah tenda pengungsian di Mazraq pada 30 Maret yang menewaskan sedikitnya 40 orang, atau ketika sebanyak 65 warga sipil tewas ketika enam bom jatuh di kompleks perumahan di kota pelabuhan Mokha pada 24 Juli. Lebih dari setengah dari serangan udara di Yaman ini dilaporkan di daerah

berpenduduk, termasuk serangan yang terjadi di kota Sana'a. Insiden yang mengakibatkan jumlah kematian warga sipil dan cedera terbesar yang tercatat dari senjata-senjata peledak udara terjadi di Sana'a pada tanggal 20 April 2015. Serangan udara terjadi sekitar pukul 10.30 pagi menabrak depot rudal di sisi gunung di distrik barat Faj Attan. Penduduk sekitar menggambarkan ulang ledakan itu seperti gempa bumi. AOAV mencatat total 25 kematian warga sipil dan 398 cedera dalam pemboman Faj Attan. Meskipun serangan udara dilaporkan diarahkan pada sasaran militer, kekuatan ledakan terasa di banyak wilayah padat penduduk. Rumah-rumah yang terletak di perumahan dekat sumber ledakan rata dengan tanah. Gelombang kejutnya terasa hingga empat mil jauhnya, dan pekerja Palang Merah setempat melaporkan bahwa korban sipil tersebar di seluruh kota dan jendela hancur serta puing-puing bangunan berserakan di Sana'a. Sana'a telah berulang kali diserang dengan pengeboman udara dan serangan senjata peledak lainnya. Banyak serangan yang dilaporkan menargetkan sasaran militer seperti gudang senjata atau pos-pos pemeriksaan, tetapi warga sipil masih terjebak dalam efek wilayah yang luas dari senjata peledak yang digunakan. Menurut penilaian kerusakan yang dilakukan oleh Institut Pelatihan dan Penelitian PBB pada 15 Mei 2015, 440 bangunan telah terkena dampak dari kekerasan bersenjata di ibu kota, dengan 74 bangunan dilaporkan hancur total (AOAV, 2015: 7).

Pengeboman juga terjadi di pasar, dimana dalam beberapa kesempatan warga sipil yang tengah berbelanja terbunuh dan terluka oleh penggunaan senjata peledak. AOAV telah mencatat empat serangan udara yang menghantam pasar di Yaman antara. Pada 6 Juli, pesawat koalisi menjatuhkan dua amunisi di pasar ternak yang ramai di Fayoush yang terletak di wilayah Lahj di Yaman selatan. Banyak korban yang hancur berkeping-keping dalam ledakan itu dan tidak dapat diidentifikasi. Menurut *Amnesty International*, kawah-kawah di lokasi yang memiliki kedalaman tiga meter dan diameter empat meter mengindikasikan bahwa sebuah bom pesawat dengan berat antara 500 dan 1.000 pound telah diledakkan di pasar tersebut. Secara keseluruhan, setidaknya 41 orang tewas dan 23 lainnya cedera dalam serangan tersebut (AOAV, 2015: 9).

Pada tanggal 4 Juli, dua serangan udara menghantam pasar yang sibuk di Beni Hassan di provinsi Hajjah. Ledakan pertama menghantam sebuah pompa bensin sekitar pukul 8.30 malam. Yang kedua, setengah jam kemudian, jatuh di jantung pasar yang ramai serta dua restoran dan sebuah hotel. Staf medis kewalahan oleh skala dan tingkat keparahan cedera. Seluruh tim terkejut dengan apa yang telah mereka lihat, terutama karena itu terjadi pada orang yang menikmati malam di bulan Ramadhan (AOAV, 2015: 9).

Koalisi memulai kampanye pengeboman udara melawan pasukan Houthi pada 26 Maret 2015, dan mulai melakukan blokade darat, laut dan udara untuk menghindari masuknya senjata yang ditujukan kepada kelompok Houthi. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada tahun 2016 bandara San'a' ditutup untuk semua penerbangan komersial termasuk untuk orang-orang yang membutuhkan perawatan medis di luar negeri. Mengunci 28 juta orang dan mengunci 500.000 MT makanan dan bahan bakar, dan bantuan lain sebanyak 1.476 MT (AOAV: 2015). Bandara merupakan salah satu jalur yang penting di Yaman karena ketergantungan negara pada impor. Jalur ini terhambat karena sebagian besar bandara di Yaman tidak terbuka untuk lalu lintas sipil, dan transportasi melalui laut tunduk pada rezim inspeksi koalisi terkait dengan embargo senjata yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB.



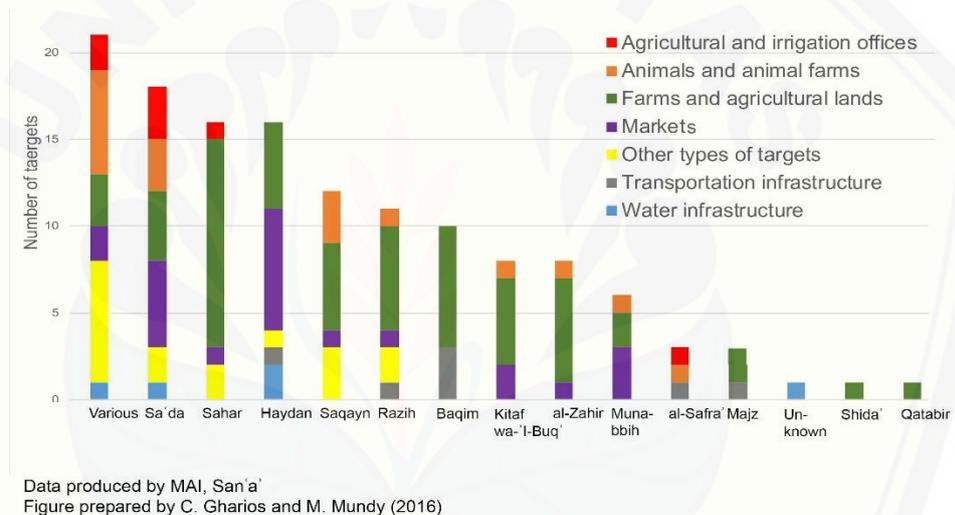
**Gambar 3.1.1** Frekuensi penargetan serangan udara Maret 2015 - Maret 2018

Sumber: World Peace Foundation (2018)

Sejak dilakukannya intervensi, diperkirakan bahwa koalisi yang dipimpin Saudi telah melakukan 18.000 serangan udara. Dari Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa frekuensi serangan yang tinggi dilakukan di hampir seluruh wilayah Yaman, serangan terbanyak dilakukan di wilayah Sa'ada yang terletak di Yaman

bagian utara, Al Hudaydah yang merupakan kota pelabuhan, Al-Makha di Yaman bagian selatan dan wilayah-wilayah yang terletak di antara perbatasan Yaman dan Arab Saudi.

Serangan-serangan yang diluncurkan tersebut termasuk pemboman yang diluncurkan pada bus sekolah yang menewaskan sedikitnya 51 orang, termasuk 40 anak-anak, dan pemboman rumah sakit umum utama Hudaydah yang menewaskan puluhan orang. Selain itu, pusat-pusat kesehatan, infrastruktur air dan sanitasi di sebelah selatan kota al-Hudayda juga telah dibom. Dan pada tanggal 23 Agustus 2018, di sebelah selatan kota al-Hudayda, sebuah bus yang membawa perempuan dan anak-anak diserang (Dunning, 2018: 7).



**Gambar 3.1.2.** Frekuensi pengeboman infrastruktur, lahan pertanian, lahan peternakan, dan pasar di Yaman

Sumber: *World Peace Foundation* (2016)

Gambar 3.2 adalah data yang menunjukkan frekuensi pengeboman infrastruktur, lahan pertanian, lahan peternakan, dan pasar. Pusat irigasi juga menjadi sasaran pengeboman dimana terhitung hingga tanggal 25 September 2018 terjadi 15 pemberhentian pusat irigasi karena pesawat koalisi berulang kali diluncurkan di pusat *Tihama Development Authority/TDA*<sup>5</sup> di pinggiran selatan

<sup>5</sup> *Tihama Development Authority* (TDA) didirikan pada tahun 1973 bertujuan untuk memperkuat pemilik lahan di wilayah hulu untuk mengembangkan perkebunan buah berorientasi pasar (Mundy, 2018: 14).

kota al-Hudayda. Pada tanggal 4 Oktober struktur irigasi di wadi Siham dan pada 6 Oktober terjadi 3 serangan di kompleks TDA yang dijadikan sasaran. *Yemen Data Project* (YDP) mendokumentasikan bahwa Serangan terhadap fasilitas Otoritas Pengembangan Tihama itu terus berlanjut dengan dua insiden pada akhir 2016 dan tiga pada awal 2017, termasuk serangan di kantor wadi Zabid. Tidak berhenti sampai disitu, lahan pertanian juga turut menjadi sasaran pengeboman dalam perang yang terjadi. Disusul serangan pada agrikultural, irigasi, hewan ternak, dan peternakan sesuai dengan gambar diatas. Selain itu, infrastruktur transportasi dan infrastruktur air juga dijadikan sasaran pengeboman (Mundy, 2018: 14).

*Human Rights Watch* mendokumentasikan puluhan serangan udara koalisi yang menyebabkan korban sipil yang beberapa di antara serangan tersebut mungkin merupakan kejahatan perang, termasuk serangan udara di sebuah kamp untuk orang-orang terlantar di dekat perbatasan Yaman dengan Arab Saudi yang menewaskan sedikitnya 29 warga sipil, serangan udara di sebuah pabrik susu di luar Hudaydah yang menewaskan sedikitnya 31 warga sipil, serangan udara di sebuah pasar dan kebun lemon di kota Zabid yang terletak di selatan Hudaydah yang menewaskan sedikitnya 60 warga sipil, serangan udara di pasar desa di Muthalith Ahim yang terletak di selatan perbatasan Saudi yang menewaskan sedikitnya 65 orang, dan serangan udara di rumah-rumah di kota pelabuhan Mokha yang menewaskan sedikitnya 65 warga sipil. Di wilayah utara Yaman di Saada, *Human Rights Watch* memeriksa banyak serangan udara koalisi yang menghancurkan dan merusak rumah, lima pasar, sebuah sekolah, dan sebuah stasiun pengisian bensin, tetapi tidak menemukan bukti target militer. Serangan tersebut menewaskan 59 orang dimana semuanya adalah warga sipil, termasuk setidaknya 35 anak-anak (*World Peace Foundation*: 2018).

### **3.1.3. Intervensi di Wilayah Laut**

Selain wilayah darat dan udara, wilayah laut juga tidak luput dari serangan Arab Saudi. Pertama, blokade laut koalisi Arab Saudi diberlakukan segera setelah kampanye pemboman dimulai pada 26 Maret. Seorang juru bicara koalisi mengatakan bahwa semua kapal angkatan laut yang dibutuhkan untuk blokade

sudah ada, dan mereka memantau semua kapal yang akan memasuki dan meninggalkan pelabuhan Yaman. Empat profesional industri perkapalan mengatakan kepada *Human Rights Watch* bahwa menurut catatan pengiriman, sejak 28 Maret tidak ada kapal yang memuat pasokan bahan bakar yang memasuki Yaman. Mengilustrasikan dampaknya, seorang pekerja bantuan melaporkan bahwa daerah konflik di Aden mengalami pemadaman listrik selama 10 hari (*World Peace Foundation*: 2018).

Petugas pengiriman barang mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa untuk memasuki pelabuhan Hudaydah dan Saleef yang berada di pantai barat Yaman, dokumen aplikasi pengiriman barang harus diajukan ke Kementerian Transportasi Yaman yang saat ini berbasis di Jeddah, Arab Saudi dan harus mendapat persetujuan dari pasukan koalisi. Untuk Aden, aplikasi harus diajukan ke kantor *Popular Resistance Committee* di Aden yang kemudian akan melaporkannya terlebih dahulu ke pasukan koalisi. Selain itu, mereka juga harus membuktikan bahwa muatan mereka tidak akan bermanfaat bagi Houthi, tetapi mereka tidak mengerti apa yang diperlukan untuk melakukan ini, dan koalisi belum mengeluarkan instruksi selanjutnya. Kemudian, pada 14 April, Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata dan pembatasan perjalanan terhadap kelompok Houthi. Selain itu, barang-barang yang diembargo dan prosedur blokade juga tidak diumumkan secara terbuka.

### **3.2. Kepentingan Arab Saudi di Yaman**

Motif Arab Saudi melakukan intervensi terhadap konflik di Yaman yang pertama adalah menguasai jalur strategis selat bab el mandeb sebagai jalur strategis lalu lintas minyak Arab Saudi ke samudera hindia dan internasional. Selat Bab el-Mandeb adalah alur pelayaran antara Tanjung Afrika dan Timur Tengah. Selat ini juga merupakan penghubung strategis antara Laut Mediterania dan Samudra Hindia. Selat ini terletak antara Yaman, Djibouti, dan Eritrea serta menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Laut Arab. Sebagian besar ekspor dari Teluk Persia yang transit di Terusan Suez dan Pipa SUMED juga melintasi Bab el-Mandeb (Priambodo, S., 2017: 210)

Secara geografis kawasan Timur Tengah berbatasan dengan tujuh lautan yang strategis, yaitu Laut Tengah (Mediterrania) terletak di perbatasan antara Mesir, Libya dan Tunisia; Laut Merah terletak di perbatasan antara Arab Saudi dan Sudan; Laut Arab, terletak di bagian barat laut Samudera Hindia diantara Saudi Arabia dan India; Laut Mati, terletak di perbatasan Yordania dan Israel; Laut Kaspia berbatasan dengan Iran dan Laut Hitam terletak di Turki dan terakhir adalah Laut Aegean. Selain itu Timur Tengah juga memiliki lima selat strategis yang bernilai penting bagi perdagangan dunia, yaitu (1) Selat Gibraltar yang digunakan sebagai jalan pendek perjalanan kapal-kapal dari Samudera Atlantik ke Asia, terletak diantara Maroko dan Spanyol; (2) Selat Bab – Al Mandap terletak di pesisir Yaman, merupakan jalur yang digunakan kapal menuju Terusan Suez, Laut Merah, dan Samudera Hindia; (3) Selat Turki, digunakan sebagai tempat transit perdagangan dari Samudera Atlantik ke Asia. Selat Turki juga menjadi jalan satu – satunya jalur perdagangan Rusia dari Laut Hitam ke Laut Tengah; (4) Selat Hormuz, terletak di Iran sebelah utara dan Oman di sebelah selatan. Sangat strategis karena menjadi jalur semua kapal atau transportasi minyak dari dan ke Teluk Persia, Laut Arab, Samudera Hindia; (5) Terusan Suez, merupakan jalur vital bagi pelayaran dari Laut Tengah ke Afrika dan Asia.

Bab El Mandeb yang terletak di Yaman sejak dulu merupakan pusat sejarah dan peradaban yang mampu mengendalikan atau menghentikan rute perdagangan terpendek antara Eropa, Afrika Utara, India, dan Asia Timur. Arab Saudi memiliki Petroline sepanjang 746 mil, dikenal juga dengan nama *East-West Pipeline*, yang membentang melintasi Arab Saudi ke Laut Merah. Sistem Petroline terdiri dari dua jalur pipa dengan kapasitas maksimum 4,8 juta bbl/d. Jalur pipa sebesar 56 inci berkapasitas 3 juta bbl/d, dan saat ini mampu mengangkut sekitar 2 juta bbl/d. Jalur pipa sebesar 48 inci telah beroperasi dalam beberapa tahun terakhir sebagai pipa gas alam, lalu dialihfungsikan menjadi pipa minyak oleh Arab Saudi. Alih fungsi ini meningkatkan kapasitas pipa minyak sisa Arab Saudi untuk menghindari Selat Hormuz dari 1 juta bbl/d ke 2,8 juta bbl/d, tetapi ini baru dapat dicapai apabila sistem tersebut beroperasi dengan kapasitas maksimum (Priambodo, 2017: 211).

Ekspor minyak ini memainkan peran penting dalam pemasokan energi ke negara-negara berekonomi besar seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan serta membatasi harga minyak, gas, dan produk minyak bumi global. Ekspor minyak juga memengaruhi harga minyak dan produk minyak bumi global menurut asalnya. Jalur Strategis tersebut menjadi motif bagi Arab Saudi didalam melakukan intervensi terhadap Yaman, karena jalur bab el mandeb yang ada di Yaman ini sangat berpengaruh terhadap jalur perdagangan Arab Saudi yang dimana dikarenakan setiap kapal yang berangkat atau datang dari Arab Saudi akan melewati selat tersebut, maka dari itu menguasai jalur strategis merupakan hal yang utama dalam motif Arab Saudi untuk intervensi terhadap Yaman.

Penutupan Bab el-Mandeb membuat kapal-kapal tanker dari Teluk Persia tidak bisa mencapai Terusan Suez dan memaksa mereka berputar mengelilingi ujung selatan Afrika sehingga menambah waktu dan biaya transit. Selain itu, perdagangan minyak ke selatan dari Eropa dan Afrika Utara tidak dapat memanfaatkan rute paling singkat ke Asia melalui Terusan Suez dan Bab el-Mandeb. Maka dari itu di sini bisa kita lihat mengapa Bab el Mandeb menjadi strategis dimana selat tersebut mempermudah rute perdagangan dan dapat mempercepat waktu serta memotong biaya perjalanan dengan mengambil rute terpendek untuk mencapai terusan suez.

Kedua, Arab Saudi yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Yaman, mengkhawatirkan pemberontakan akan mengganggu wilayahnya. Arab Saudi kemudian menyumbang dana ke pemerintah Yaman untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan guna membendung pergerakan pemberontakan Houthi untuk masuk ke dalam teritori Arab Saudi. Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi tidak hanya sebagai bentuk pertahanan pemerintah Yaman dari kelompok pemberontak di negara tersebut, namun juga terdapat kepentingan Arab Saudi untuk menjaga stabilitas negaranya sendiri, utamanya di wilayah perbatasan Arab Saudi-Yaman. Wilayah perbatasan telah menjadi daerah sindikat penyelundup obat bius dan perdagangan manusia.

Sedangkan bagi Arab Saudi yang memiliki panjang perbatasan 1770 km dengan Yaman, keamanan dan kestabilan Yaman adalah pertarungan yang tinggi. Untuk menghadapi hal tersebut, Arab Saudi tidak bisa hanya mengandalkan strategi keamanan yang dimilikinya, namun juga harus bekerjasama dengan pemerintah Yaman. Kelompok Houthi dianggap sebagai ancaman karena telah berani melakukan pergerakan hingga masuk ke wilayah teritorial Arab Saudi dan menimbulkan kekhawatiran bagi Arab Saudi, serta menimbulkan ancaman keamanan nasional Arab Saudi.

Selain kepentingan keamanan, Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam konflik di Yaman juga bertujuan supaya pemerintahan resmi Yaman yang dikuasai oleh Islam Sunni tidak jatuh ke pemberontak Houthi yang berkeyakinan Syiah. Arab Saudi khawatir bahwa kebangkitan Houthi akan menginspirasi minoritas Zaydi dan Syiah di negaranya (Priambodo, 2017: 212). Dengan fakta bahwa 35% jumlah penduduk Yaman adalah orang-orang Syiah, Yaman dapat menjadi potensi ancaman bagi Arab Saudi. Dimana Intervensi tersebut ditujukan untuk membendung kekuatan dan pengaruh dari Syiah Zaidiyah yang dibawa dan disebarluaskan oleh kelompok pemberontak Houthi.

Arab Saudi menganut aliran Islam Sunni yang merupakan aliran mayoritas di seluruh dunia dan dianggap sebagai ideologi Islam yang benar. Sedangkan Syiah sebagai aliran yang ditentang. Hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan dasar-dasar ajaran dari kedua aliran. Konstitusi Islam yang dianut Arab Saudi pada dasarnya adalah ajaran dasar yang dipakai oleh aliran Sunni. Sunni dan Syiah merupakan dua entitas yang tidak mungkin dapat dipersatukan karena ajaran yang saling bertentangan. Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik ini juga merupakan upaya untuk mengurangi timbulnya konflik horizontal antara Sunni dan Syiah. Apabila konflik horizontal benar-benar terjadi, maka hal itu akan mengganggu stabilitas sosial dan terganggunya kemurnian ajaran budaya muslim Sunni yang ada di Arab Saudi (Ananda, 2015: 232).

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

Intervensi Arab Saudi dalam perang saudara di Yaman berimplikasi terhadap terjadinya krisis kemanusiaan yang kompleks. Hal tersebut terjadi karena sebelum adanya intervensi Arab Saudi dan koalisinya, Yaman sudah berada dalam pergolakan krisis kemanusiaan dan menghadapi kekerasan teroris, kekurangan air, dan korupsi yang merajalela. Intervensi Arab Saudi meningkatkan intensitas konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman yang ditandai dengan meningkatnya segala aspek krisis kemanusiaan yang meliputi kekerasan yang meluas, perpindahan penduduk, dampak konflik terhadap perekonomian, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan, terdapat hambatan atas bantuan kemanusiaan, serta ancaman keamanan bagi pekerja bantuan kemanusiaan.

Intervensi telah memperparah kondisi krisis yang ditandai dengan meningkatnya kekerasan yang meluas, dimana selain ancaman kematian dan cedera pada warga akibat senjata peledak yang secara konsisten menyebabkan cedera parah, kerusakan jangka panjang juga terjadi pada rumah, layanan dan infrastruktur-infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan sanitasi serta sistem pasokan energi. Selain itu, intervensi juga telah menyebabkan banyak korban dan melumpuhkan perekonomian, dimana mata pencaharian juga hilang karena properti komersial dan sarana produksi yang rusak atau hancur. Senjata peledak juga meninggalkan sisa-sisa bahan peledak perang yang dapat terus menimbulkan ancaman serius bagi warga sipil, khususnya anak-anak bahkan selama beberapa dekade setelah konflik telah berakhir.

Kebutuhan akan bantuan kemanusiaan juga meningkat dengan munculnya hambatan pada bantuan kemanusiaan yang mempersulit proses penyaluran bantuan yang menyebabkan kelaparan dan mewabahnya penyakit. Selain itu, laporan tentang wabah kolera yang menyebar juga menambah penderitaan mereka. Sistem kesehatan telah kehilangan kapasitas untuk menyediakan layanan dasar dengan sebagian fasilitas kesehatan yang tidak lagi berfungsi penuh. Ancaman

keamanan yang signifikan juga dialami oleh pekerja bantuan kemanusiaan di Yaman. Tantangan keamanan seperti penahanan staf, pelecehan di pos-pos pemeriksaan, proses visa tertunda, campur tangan lokal dalam pengiriman dan pemantauan program dialami oleh pekerja bantuan kemanusiaan yang kemudian memperlambat penyaluran bantuan. Intervensi yang terjadi juga telah berkontribusi terhadap pengungsian internal dalam skala besar di Yaman.



**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Adolf, H. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amnesty International. 2012. *Conflict in Yemen: Arbyan's Darkest Hour*: London, United Kingdom: Amnesty International Ltd.

Garner, Bryan A, and Henry C. Black. 2004. *Black's Law Dictionary*. United States of America: West Publishing CO.

Juneau, T. 2013. *Yemen and the Arab Spring: Elite Struggles, State Collapse and Regional Security*. Foreign Policy Research Institute. Elsevier Ltd.

Prodjodikoro W. 1967. *Azaz-Azaz Hukum Publik Internasional*. Jakarta: PT. Pembimbing Masa.

Sharp Jeremy M. 2018. *Yemen: Civil War and Regional Intervention*. United States of America: Congressional Research Service.

Starke, J.G. 2006. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta. Sinar Grafika.

Terrill W. Andrew. 2011. *The Conflict in Yemen and U.S National Security*. Unites States: Strategic Studies Institute.

**JURNAL:**

Abdi, R., dan B. Ali. 2016. A Critical Analysis of the Representation of Yemen Crisis in Ideologically-Loaded Newspaper Headlines. *Journal of Language Studies*, 16 (3): 37-50.

- Ananda, I. 2015. Latar Belakang Operaton Decisive Storm Arab Saudi Terhadap Yaman Tahun 2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(3):226-236
- Anton C. Dkk. 2018. Cholera Epidemic in Yemen, 2016-18: An Analysis of Surveillance Data. *Lancet Global Health* 2018, 6: 680-690.
- Donnelly, J. 2016. Human rights, humanitarian crisis, and humanitarian intervention. *International Journal*, 48 (4): 607-640.
- Eliza, E, Heryandi, dan S. Ahmad. 2014. Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*) menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam konflik bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum: ISSN-1978-5186*, 8(4): 629-641.
- Fink, M. D. 2017. Naval Blockade and the Humanitarian Crisis in Yemen. *Netherlands International Law Review* DOI: 10.1007/s40802-017-0092-3, 65(2): 291-307.
- Jan, F. Dan S. Majid. 2017. Yemen Crises and the Role of Saudi Arabia. *International Journal of Arts and Humanities: ISSN-2360-7998*. 5(1): 192-196.
- Ludfiani, A., H. Abubakar Eby, dan S. Bagus Sigit. 2017. Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand mengatasi gelombang pengungsi Rohingya (*Humanitarian crisis and Thailand's effort in overcoming the wave of Rohingya Refugees*). *E-Sospol*, 4(2): 82-88.
- Massingham, E. 2009. Military Intervention for humanitarian purposes: does the Responsibility to protect doctrine advance the legacy of the use of force for humanitarian ends?. *International Review of the Red Cross*, 91 (876): 803-831.
- Megan, P. 1998. Choosing to intervene: Outside Interventions Into Internal Conflicts as a Policy Choice. *Journal of Politics*, 60(3): 1-37.

- Pearson, F., W. Scott, dan S. Stephanie. 2006. Military Intervention and prospects for democratization. *International Journal of Peace Studies*, 11: 64-81.
- Popp, R. 2015. War in Yemen: Revolution and Saudi Intervention. *Centre for Security Studies*. 175: 1-4.
- Priambodo, S. 2017. Motif Intervensi Arab Saudi terhadap Perang Saudara di Yaman. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(1): 205-216.
- Yilmaz, M. Ercan. 2011. Successful interventions in internal conflicts: A framework. *Journal of Law and Conflict Resolution*, 3(1): 1-6.
- Yousefpour A, Masoumi S, Leili MS. 2017. Geopolitical analysis of Al-Houthi Shiites in the Yemeni revolution (2001 - 2012). *International Journal of Scientific Study*, 5(5): 257-262.

**KARYA TULIS ILMIAH YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN:**

- Jakti, G. Prabowo. 2015. Upaya Pemerintah Ali Abdullah Saleh Menyelesaikan Konflik dengan Pemberontak Al-Houthi. *Skripsi*. Jember. Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember.
- Lockyer A. 2008. Foreign Intervention and Warfare in Civil Wars: The Effect of Exogenous Resources On the Course and Nature of the Angolan and Afghan Conflicts. *Thesis*. Sydney: The University of Sydney.
- McCullough M. Beth. 2008. Development of a Theory-Based Intervention to Increase Children's Understanding of Health. *Thesis*. North Carolina: The University of North Carolina Wilmington.
- Orkaby, Asher Aviad. 2014. The International History of the Yemen Civil War, 1962-1968. *Doctoral Dissertation*, Harvard University.
- Putra, Andrew F.S. 2015. Intervensi terhadap kedaulatan suatu negara menurut Hukum Internasional. *Skripsi*. Purwokerto. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Sousa, Richardo. 2014. Effect of external interventions on conflict intensity. *Thesis*. Erasmus University Rotterdam.

Ward M.R. 2010. Identity in Crisis: The Politics of Humanitarian Intervention: *Thesis*. The University of Edinburgh.

**PAPER:**

Carment, David and Dane Rowlands. *The Role of Bias in Third Party Intervention: Theory and Evidence*. BCSIA Discussion Paper 2001-08, International Security Program of Kennedy School of Government, Harvard University, October 2001.

Coppi, G. 2018. *The Humanitarian Crisis in Yemen: Beyond the Man-Made Disasters*. International Peace Institute. Januari 2018.

Elbadawi, Ibrahim A.; Sambanis, Nicholas. 2000. *External Interventions and the Duration of Civil Wars (English)*. Policy, Research working paper; no. WPS 2433. Washington, DC: World Bank.

**LAPORAN:**

Action on Armed Violence (AOAV) dan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). *State of Crisis: Explosive Weapons in Yemen*. London. Action on Armed Violence (AOAV) and OCHA Policy Development and Studies Branch.

Feinstein International Center. 2012. *Climate change as a Driver of Humanitarian Crises and Response*. USA. Tuft University.

Governance and Peace-building Centre dan Centre for International Development issues Nijmegen. 2017. *Yemen Between the Impact of the Climate Change and the Ongoing Saudi-Yemen War: A Real Tragedy*. Sana'a.

Guha, Debarati; Hoyois, P; Wallemacq, P; and Below, R. 2016. *Annual Disaster Statistical Review 2016*. Brussels, Belgium.

- Guha-Sapir D, Hoyois Ph., Wallemacq P. Below R. 2016. *Annual Disaster Statistical Review 2016: The Numbers and Trends*. Brussel: CRED.
- Hadden R. Lee. 2012. *The Geology of Yemen: An Annotated Bibliography of Yemen's Geology, Geography and Earth Science*: Alexandria, Virginia: US Army Corps of Engineers.
- Humanitarian Foresight Think Tank. 2017. *Yemen Six Month Economic Analysis Economic Warfare and the Humanitarian*. Paris. Institut de Relations Internationales et Strategiques (IRIS).
- International Council of Nurses (ICN). 2009. *ICN Framework of Disaster Nursing Competences*. Jenewa. International Council of Nurses.
- Lopour, J. 2016. *Spotlight on Yemen's Forgotten War and Humanitarian Disaster: Preventing the Next Syrian Refugee Crisis*. Cigi papers No. 97, Maret 2016.
- Mohammed, H dkk., 2017. *Yemen between the Impact of the Climate Change and the Ongoing Saudi-Yemen War: A Real Tragedy*. Sana'a. Governance and Peace-building Centre.
- Quintanilla J, Hardman J, Abud M, Campbell A, Ensor D. 2014. *Reporting on Humanitarian Crises*. California. Internews.
- Republic of Yemen. 2016. *Republic of Yemen National Report*. Ecuador
- Schaar, J. 2006. *Review of International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies recovery operations: Summary report*: IFRC.
- The War Report 2017. 2017. *The Armed Conflict in Yemen: A Complicated Mosaic*. Genewa Academy.
- UNHCR. 2013. *Emergency Response for Internally Displaced Persons returning to Abyan Governance in Yemen*. UNHCR

UNOCHA. 2014. *Humanitarian Response Plan: Yemen*. UNOCHA

UNOCHA. 2018. *Humanitarian Needs Overview 2018*. The Secretariat of the United Nations.

World Peace Foundation. *The Strategies of the coalition in the Yemen War: Aerial Bombardment and Food War*. World Peace Foundation.

#### **ARTIKEL DARI INTERNET:**

Amnesty International. 2018. *Stranglehold: Coalition and Huthi obstacles compound Yemen's Humanitarian Crisis*. <https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3185052018ENGLISH.pdf>. Diakses pada 21 Januari 2019.

Bajri, H. 2017. *Intervensi Arab Saudi dan Iran pada konflik antara Houthi dan Pemerintah Yaman pada tahun 2011-2017*. [https://www.researchgate.net/publication/323734332\\_INTERVENSI\\_ARAB\\_SAUDI\\_DAN\\_IRAN\\_PADA\\_KONFLIK\\_ANTARA\\_HOUTHIDAN\\_PEMERINTAH\\_YAMAN\\_PADA\\_TAHUN\\_2011-2017](https://www.researchgate.net/publication/323734332_INTERVENSI_ARAB_SAUDI_DAN_IRAN_PADA_KONFLIK_ANTARA_HOUTHIDAN_PEMERINTAH_YAMAN_PADA_TAHUN_2011-2017). Diakses pada 13 Juli 2018.

Bonnefoy, L. 2018. *The War and Humanitarian Crisis in Yemen: A forgotten Conflict?*. [https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2018/Yemen\\_Humanitarian\\_Crisis\\_Laurent\\_Bonnefoy\\_Medyearbook2018.pdf](https://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2018/Yemen_Humanitarian_Crisis_Laurent_Bonnefoy_Medyearbook2018.pdf). Diakses pada 21 Januari 2019.

Coppi, G. 2018. *The Humanitarian Crisis in Yemen: Beyond the Man-Made Disaster*. <https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/01/IPI-Rpt-Humanitarian-Crisis-in-Yemen.pdf>. Diakses pada 12 Desember 2018.

Deconfliction Liaison Team. 2018. *UNOCHA Deconfliction Information*. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction\\_workshop\\_april\\_18.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/deconfliction_workshop_april_18.pdf). Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

- Dunning, T. 2018. Yemen-“ *The Worst Humanitarian Crisis in The World*” *Continues*[https://www.researchgate.net/publication/329544463\\_Yemen\\_-\\_the\\_'worst\\_humanitarian\\_crisis\\_in\\_the\\_world'\\_continues\\_](https://www.researchgate.net/publication/329544463_Yemen_-_the_'worst_humanitarian_crisis_in_the_world'_continues_). Diakses pada tanggal 3 Februari 2019.
- Mundy, M. 2018. *The Strategies of the Coalition in Yemen War: Aerial Bombardment and Food War*. <https://sites.tufts.edu/wpf/files/2018/10/Strategies-of-Coalition-in-Yemen-War-Final-20181005-1.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019.
- Norwegian Refugee Council. 2018. *Drivers of Yemen's Humanitarian Crisis*. [https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/relations\\_internationales/Groupes\\_d\\_amitie/NRC\\_\\_Drivers\\_of\\_Yemen\\_s\\_Humanitarian\\_Crisis\\_Paper\\_20180522.pdf](https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/rerelations_internationales/Groupes_d_amitie/NRC__Drivers_of_Yemen_s_Humanitarian_Crisis_Paper_20180522.pdf). Diakses pada 20 November 2018.
- Roberts, D. dan S. Kareem. 2015. *Saudi Arabia launches Yemen air strikes as alliances builds against Houthi rebels*. <https://www.theguardian.com/world/2015/mar/26/saudi-arabia-begins-airstrikes-against-houthi-in-yemen>. Diakses pada 21 Januari 2019.
- UNICEF. 2018. *Yemen Humanitarian Situation Report*. Unicef. [https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF\\_Yemen\\_Humanitarian\\_Situation\\_Report\\_Sept\\_2018.pdf](https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Yemen_Humanitarian_Situation_Report_Sept_2018.pdf). Diakses pada tanggal 3 februari 2019.
- UNVIM. 2018. *Yemen: UNVIM Imports Update*. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA\\_Yemen\\_UNVIM\\_Ports\\_situation\\_%2018%20Jan.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Yemen_UNVIM_Ports_situation_%2018%20Jan.pdf). Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.
- Walsh, D. 2018. *The Tragedy of Saudi Arabia's War*. <https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/26/world/middleeast/saudi-arabia-war-yemen.html>. Diakses pada 30 Januari 2019.